



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Sutan Syahrir No. 16 Kotak Pos 1016 Pontianak 78116 A  
Telp. (0561) 732521 Fax. (0561) 766073

Website : <http://dislautkan.kalbarprov.go.id>

e-mail : [dkp@kalbarprov.go.id](mailto:dkp@kalbarprov.go.id)

# **RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

**PERUBAHAN TAHUN 2018-2023**



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
TAHUN 2021**

**R  
E  
N  
S  
T  
R  
A  
  
P  
D**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan petunjuk-Nya sehingga dapat menyelesaikan penyusunan “**Rencana Strategis Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023**” sebagai dokumen perencanaan pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan selama lima tahun kedepan yaitu tahun 2018-2023, dengan mengacu pada RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, RPJMN Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Tahun 2020-2024.

Rencana Strategis ini disusun untuk menjadi acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan periode 2018-2023 sehingga dapat menjadi kontribusi pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat terutama untuk kelautan dan perikanan. Dalam penyusunan Renstra ini kami mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, baik dari stakeholder dan instansi terkait lainnya dalam mensukseskan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Barat.

Akhirnya atas segala masukan saran, ide dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak dalam penyusunan Renstra ini, disampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang terkait. Akhir kata, semoga dokumen Rencana Strategis ini bermanfaat bagi Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka menjalankan program dan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2023.

Pontianak, Februari 2021

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Barat



**Ir. HERTI HERAWATI, MMA**

Pembina Utama Madya  
NIP. 19680725 199303 2 003

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang .....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-5
1.3 Maksud dan Tujuan .....	I-9
1.4 Sistematika Penulisan .....	I-10
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH .....</b>	<b>II-12</b>
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan .....	II-12
2.2 Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.....	II-23
2.2.1 Jumlah Pegawai .....	II-23
2.2.2 Aset/ Model .....	II-23
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan .....	II-24
2.3.1 Kinerja Pelayanan Sektor Kelautan dan Perikanan .....	II-24
2.4 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan .....	II-28
2.4.1 Tantangan.....	II-28
2.4.2 Peluang .....	II-29
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .....</b>	<b>III-1</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan .....	III-31
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih .....	III-34
3.3 Telaahan RENSTRA Kementerian Kelautan dan Perikanan dan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan .....	III-36
3.4 Telaahan RTRW dan KLHS .....	III-38
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III-43
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>IV-45</b>
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	IV-45
<b>BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....</b>	<b>V-48</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>VI-51</b>
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN .....</b>	<b>VII-65</b>
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>VIII-67</b>

## **BAB.I PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Dokumen Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat diselaraskan dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yang merupakan pelaksanaan periode lima tahunan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 dengan visi “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Selama pelaksanaan RPJMD tersebut, telah terjadi beberapa perubahan kebijakan Nasional, diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain itu adanya perubahan struktur Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9) serta adanya pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dengan Terbitnya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Nonalam Penyebaran Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Hasil dari Evaluasi RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 pada tahun 2020 diperoleh Rekomendasi untuk melakukan beberapa penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yang meliputi penyempurnaan pada: 1) Target indikator makro pembangunan daerah sebagaimana pada bab VIII RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dengan adanya pandemi Covid-19. 2) Indikator yang kurang relevan dengan pencapaian hasil indikator tujuan. 3) Indikator Sasaran dan Program dengan adanya perubahan Struktur Organisasi. 4) Indikator sesuai hasil rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Memperhatikan beberapa pertimbangan diatas, untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya paradigma pembangunan kelautan dan perikanan tetap selaras mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk :

1. Meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil;
2. Meningkatkan penerimaan dan devisa negara;
3. Mendorong perluasan kesempatan kerja;
4. Meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan;
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya ikan;
6. Meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing;
7. Meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan;
8. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumberdaya ikan; dan
9. Menjamin kelestarian sumberdaya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Sedangkan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 menyatakan bahwa tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah :

1. Melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologiinya secara berkelanjutan;
2. Menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil;
3. Memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan, dan
4. Meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Upaya memanfaatkan sumber daya ikan secara optimal, berkelanjutan, dan lestari merupakan tuntutan yang sangat mendesak bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan, pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta peningkatan ekspor untuk menghasilkan devisa negara. Hal ini pula sesuai dengan Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2022 yaitu “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan” dan Misi

sektor kelautan dan perikanan di arahkan pada misi ke 4 yaitu Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dan bisa memberikan manfaat yang semaksimal mungkin bagi masyarakat dan negara serta menjamin keberlangsungan usaha perikanan di daerah, maka sudah seharusnya pembangunan dan aktivitas sektor kelautan dan perikanan di daerah secepatnya diarahkan untuk penerapan dan konsep atau kaidah-kaidah pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Pada dasarnya pembangunan berkelanjutan, termasuk sektor kelautan dan perikanan, mencakup tiga aspek utama, yaitu: aspek ekologi, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Tanpa keberlanjutan ekologi, misalnya penggunaan teknologi yang merusak atau tidak ramah lingkungan, akan menyebabkan menurunnya sumber daya ikan bahkan juga bisa punah, sehingga akibatnya kegiatan ekonomi perikanan akan terhenti dan tentu akan berdampak pula pada kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat yang terlibat kegiatan perikanan. Kemudian, tanpa keberlanjutan ekonomi, misalnya rendahnya harga ikan yang tidak sesuai dengan biaya operasional, maka akan menimbulkan eksploitasi besar-besaran untuk dapat menutup biaya produksi yang dapat merusak kehidupan ekologi perikanan. Begitu pula tanpa keberlanjutan kehidupan sosial para stakeholder perikanan maka proses pemanfaatan perikanan dan kegiatan ekonominya akan menimbulkan berbagai konflik sosial di masyarakat penggunaannya.

Dengan demikian, untuk mewujudkan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan maka tentunya harus diimbangi dengan regulasi, kebijakan dan konsep perencanaan yang matang, tepat dan efektif. Menindaklanjuti hal tersebut, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat memandang perlu untuk membuat Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Sektor Kelautan dan Perikanan yang akan fokus pada ***“Pengelolaan Sektor kelautan dan Perikanan Yang Berkelanjutan untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Kalimantan Barat”***.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 adalah suatu dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat permasalahan dan isu strategis perangkat daerah, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, rencana program dan kegiatan serta pendanaan OPD Dinas yang bertujuan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan. Dalam penyusunannya Rencana Strategis OPD memuat berbagai permasalahan yang akan dihadapi, analisis masalah, solusi yang akan ditempuh melalui berbagai target/sasaran yang akan dicapai, program/kegiatan yang akan dilaksanakan, dan harapan yang ingin dicapai dari pelaksanaan program/kegiatan tersebut. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 114 Tahun 2016 adalah salah satu OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang disertai tugas menangani urusan pemerintahan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau – pulau kecil dan pengawasan; untuk membantu Gubernur dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan 5 tahun ke depan, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat menyusun Renstra 2018-2023 yang diawali dari : (1) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan pada lima tahun terakhir; (2) menggali informasi permasalahan pada tingkat bawah/lapangan; (3) mengumpulkan masukan dari SKPD lingkup Pemerintah Provinsi dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota; (4) penelaahan terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan 2013-2018, (5) penelaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Provinsi Kalimantan Barat; dan (6) memformulasikan semua aspek tersebut dalam sebuah kerangka pemikiran yang komprehensif, akurat, terukur, fleksibel, efektif, efisien dan mudah dilaksanakan, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dilakukan secara bersamaan dengan penyusunan RPJMD Perubahan Provinsi Kalimantan Barat periode 2018-2023, dengan memperhatikan sumberdaya dan potensi yang dimiliki oleh daerah, faktor keberhasilan, evaluasi pembangunan serta isu strategis yang berkembang. Peran dan fungsi Renstra Organisasi Perangkat

Daerah Provinsi Kalimantan Barat sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat, maka penyusunan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dilakukan secara transparan dan menjangkau masukan dari berbagai pihak untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang baik. Selanjutnya dokumen perencanaan Renstra ini akan dijabarkan kembali secara teknis dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan setiap tahunnya.

## 1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat ini adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau

- Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
  10. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
  11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5603);
  14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman

Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan.;

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
23. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nasional Nonalam Penyebaran Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional
24. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 32);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Laporan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
32. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1138);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
35. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014 Nomor 10 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8);
36. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
37. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

38. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038;
39. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2019 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
40. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
41. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 89 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan tugas Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
42. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 90 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan tugas UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Kalimantan Barat;
43. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 91 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan tugas Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut.

### 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat pada periode tahun 2018-2023 agar pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat adalah :

- 1) Memberikan arah pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Kalimantan Barat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat sebagai penjabaran atas RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023;
- 2) Untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu ikut mendorong tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan, sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi dalam negeri, lingkungan strategis, dan kecenderungan global yang berubah dengan cepat.

- 3) Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Kalimantan Barat untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.
- 4) Sebagai pengendali dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan agar dapat berjalan secara terintegrasi, fokus, efektif, efisien dan responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat.
- 5) Ketersediaan dokumen ini juga diharapkan menjadi salah satu acuan dasar untuk mengukur dan menilai capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat serta mengevaluasinya dalam mencapai sasaran-sasaran pembangunan, terutama dalam rangka mencapai dan mengemban visi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023.

#### **1.4. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 yang terdiri dari 8 (delapan) Bab adalah sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan Renstra terdiri dari Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

##### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Bab ini menjelaskan dan menyajikan Gambaran Umum OPD selama beberapa tahun terakhir, yang meliputi Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD; Sumber Daya OPD; Kinerja Pelayanan OPD, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

##### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menyajikan permasalahan pembangunan sesuai sektor dan isu strategis yang memperhatikan isu/kebijakan internasional, regional, nasional, daerah sekitar dan kebijakan Kalimantan Barat, yang meliputi Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah; Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan Renstra K/L; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Penentuan Isu-isu Strategis.

##### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Pada bagian ini diuraikan tentang tujuan dan sasaran jangka menengah perangkat daerah, yang disertai dengan indikator kinerja serta targetnya selama 5 (lima) tahun ke depan

## **BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi rumusan pernyataan strategi daerah kebijakan Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang.

## **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Pada bab ini disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

## **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VIII. PENUTUP**

Bab ini menguraikan tentang kaidah-kaidah pelaksanaan renstra.

## BAB. II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

##### 2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 114 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD sebagai berikut :

##### **Tugas**

Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

##### **Fungsi**

- a. Perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau – pulau kecil dan pengawasan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau – pulau kecil dan pengawasan;
- c. Pengkoordinasian dan Pembinaan teknis di bidang kelautan dan perikanan
- d. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan perikanan
- g. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Perikanan Tangkap



- d. Bidang Perikanan Budidaya
- e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan
- f. Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau kecil dan Pengawasan
- g. Unit Pelaksana Teknis
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

**a. Kepala Dinas**

Kepala dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasi, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas kepala dinas mempunyai fungsi :

- penetapan program kerja di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau – pulau kecil dan pengawasan;
- perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau – pulau kecil dan pengawasan;
- pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau – pulau kecil dan pengawasan;
- pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau – pulau kecil dan pengawasan;
- penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau – pulau kecil dan pengawasan;
- pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau – pulau kecil dan pengawasan;
- pemberian saran dan pertimbangan kepada gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan, serta kelautan, pesisir, pulau – pulau kecil dan pengawasan;

- pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh gubernur sesuai peraturan perundang-undangan

#### **b. Sekretariat**

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan administrasi kepegawaian, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan .

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat mempunyai fungsi :

- penyusunan program kerja di lingkungan sekretariat;
- penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset;
- pengkoordinasian dan fasilitasi terhadap penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- pemberian dukungan pelayanan administrasi penyusunan rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, pengelolaan keuangan dan aset serta umum dan aparatur di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
- pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang sekretariat;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan;
- pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **c. Bidang Perikanan Tangkap**

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan sumberdaya ikan, kepelabuhanan perikanan, dan



usaha perikanan tangkap serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perikanan tangkap.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- penyusunan program kerja di Bidang Perikanan Tangkap;
- penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan sumberdaya ikan;
- penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kepelabuhan perikanan;
- penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha perikanan tangkap;
- pengkoordinasian di bidang perikanan tangkap;
- pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan;
- penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan;
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perikanan tangkap;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perikanan tangkap sesuai peraturan perundang-undangan.

#### d. **Bidang Perikanan Budidaya**

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang produksi dan usaha perikanan budidaya, perbenihan dan pakan, kesehatan ikan dan lingkungan serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perikanan Budidaya.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- penyusunan program kerja di Bidang Perikanan Budidaya;
- penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Produksi dan usaha perikanan budidaya;
- penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang perbenihan dan pakan;

- penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan ikan dan lingkungan ;
- pengkoordinasian di bidang perikanan budidaya;
- pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya sesuai peraturan perundang-undangan;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan budidaya sesuai peraturan perundang-undangan;
- penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang perikanan budidaya sesuai peraturan perundang-undangan;
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang perikanan budidaya;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang perikanan budidaya sesuai peraturan perundang-undangan.

**e. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan**

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan bimbingan mutu, pemasaran dan peningkatan daya saing, pengembangan usaha dan investasi serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

- penyusunan program kerja di Bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan;
- penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengolahan dan bimbingan mutu;
- penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pemasaran dan peningkatan daya saing;
- penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis pengembangan usaha dan investasi;
- pengkoordinasian di bidang pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;

- pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan;
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan sesuai peraturan perundang-undangan.

**f. Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-Pulau Kecil, dan Pengawasan**

Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau kecil dan Pengawasan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan ruang laut dan konservasi, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil, pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang Pengolahan dan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan.

Untuk melaksanakan tugas Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau kecil dan Pengawasan mempunyai fungsi :

- penyusunan program kerja di Bidang Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau kecil dan Pengawasan;
- penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengelolaan ruang laut dan konservasi;
- penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- pengkoordinasian di bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;

- pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan;
- penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan;
- penyelenggaraan kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan;
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan;
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kelautan, pesisir, pulau-pulau kecil, dan pengawasan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi UPT SKPD**

### **2.1.1.1 UPT Pelabuhan Perikanan**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 89 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan tugas Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

#### **Tugas**

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan di bidang pelabuhan perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Fungsi**

- 1) Penyusunan program kerja UPT Pelabuhan Perikanan;
- 2) Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur, umum, pengelolaan keuangan dan asset di lingkungan UPT Pelabuhan Perikanan;
- 3) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang tata kelola dan pelayanan usaha;
- 4) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelabuhan dan kesyahbandaran;
- 5) Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan pengaturan keberangkatan, kedatangan dan keberadaan (standard an labuh) kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan di pelabuhan perikanan;

- 6) Pelaksanaan pelayanan penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan dan Keberangkatan Kapal Perikanan;
- 7) Pelaksanaan pemeriksaan log book, pelayanan bongkar muat produk perikanan;
- 8) Pelaksanaan pengawasan pelayanan penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan;
- 9) Pelaksanaan pengawasan pengisian bahan bakar;
- 10) Pelaksanaan pelayanan tugas kesyahbandaran di Pelabuhan Perikanan;
- 11) Pelaksanaan pengembangan, pemeliharaan, pendayagunaan dan pengawasan serta pengendalian sarana dan prasarana pelabuhan perikanan;
- 12) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan, perkaratinaan ikan, pemantauan wilayah pesisir, wisata bahari, pembinaan mutu, serta pengolahan pemasaran dan distribusi hasil perikanan;
- 13) Pelaksanaan tugas lain yang berhubungan dengan bidang pelabuhan perikanan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

#### 2.1.1.2 UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 90 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan tugas UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan Provinsi Kalimantan Barat mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

##### **Tugas**

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis tertentu di bidang pengujian dan penerapan mutu produk perikanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Fungsi**

- a. Penyusunan program kerja UPT Penerapan Mutu Hasil Perikanan;
- b. Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur dan umum, pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan UPT Penerapan mutu Hasil Perikanan;
- c. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pengujian mutu hasil perikanan;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penerapan mutu hasil perikanan;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis di bidang keamanan pangan hasil perikanan;
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis menguji ketelitian dan kecermatan pekerjaan laboratorium;

- g. Pelaksanaan kegiatan teknis pengujian ketelitian dan kecermatan pekerjaan laboratorium;
- h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang pengujian dan penerapan mutu produk perikanan;
- i. Pelaksanaan tugas lain di bidang penerapan mutu hasil perikanan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

### **2.1.1.3 UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 91 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan tugas Unit Pelaksana Teknis Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut mempunyai Tugas Pokok dan fungsi sebagai berikut :

#### **Tugas**

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis tertentu di bidang perikanan budidaya air payau dan laut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Fungsi**

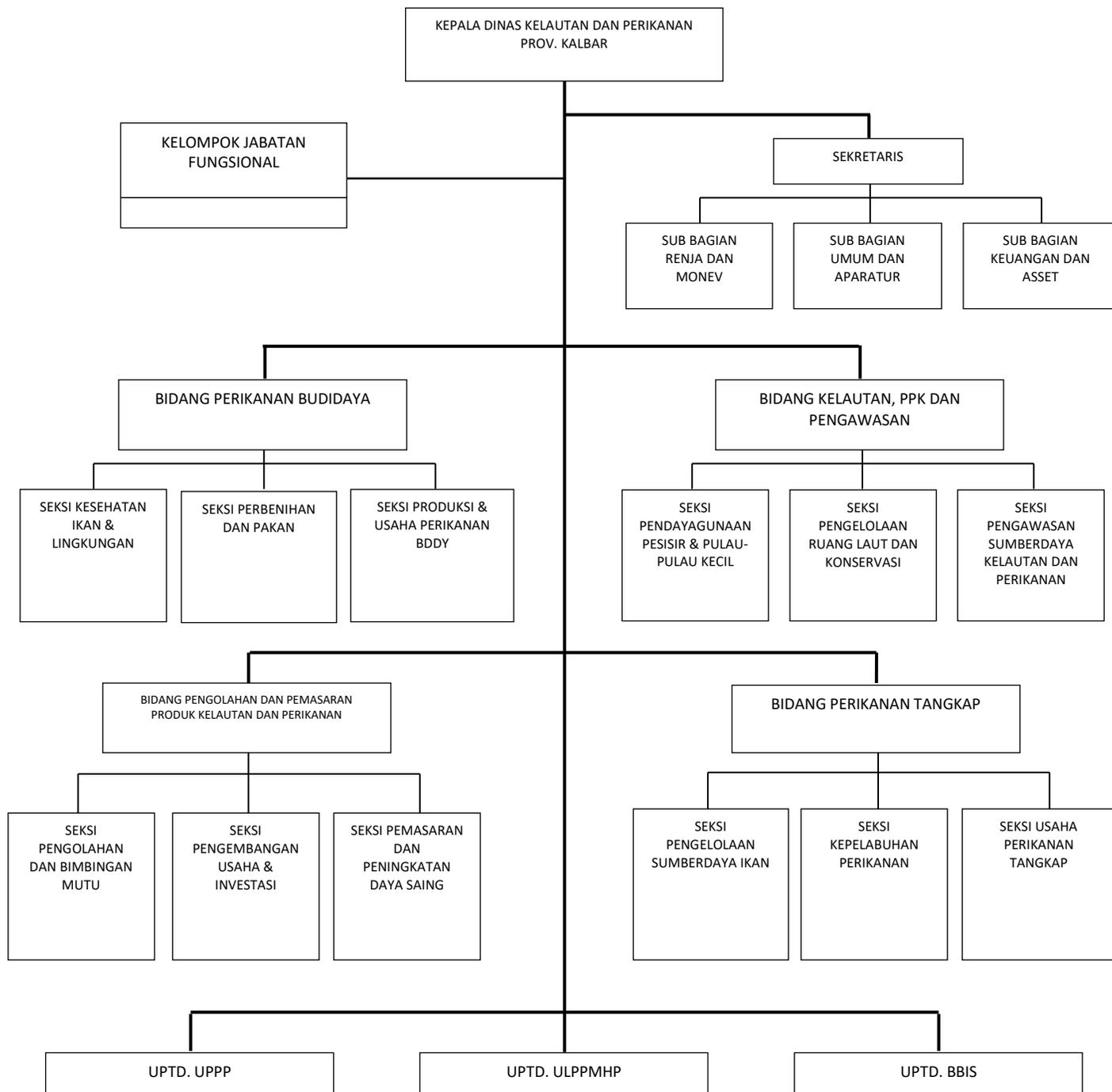
- a. Penyusunan program kerja UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut
- b. Perencanaan kegiatan yang berkaitan dengan aparatur, umum, pengelolaan keuangan dan asset di lingkungan UPT Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut;
- c. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang produksi dan distribusi;
- d. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan jasa teknologi;
- e. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang penyediaan induk dan benih unggul ikan air payau dan laut yang bersertifikasi;
- f. Pelaksanaan kegiatan teknis penerapan hasil pengembangan aplikasi teknologi budidaya ikan air payau dan laut;
- g. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional pelayanan pengujian laboratorium secara mikrobiologis, organoleptik, kimia dan fisika terhadap kualitas air dan lingkungan budidaya ikan air payau dan laut;
- h. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional penyediaan induk unggul ikan air payau dan laut dalam rangka menunjang kegiatan unit pembenihan ikan air payau dan laut;
- i. Pelaksanaan pelayanan teknis perbenihan dan budidaya air payau dan laut;
- j. Pelaksanaan pelayanan teknis sertifikasi mutu benih ikan air payau dan laut;
- k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas di bidang Perikanan Budidaya Air Payau dan Laut;

- I. Pelaksanaan tugas lain di bidang perikanan budidaya air payau dan laut yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagan struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Gambar 2.1 (Sesuai Pergub Nomor 114 Tahun 2016).

**Gambar 2.1**

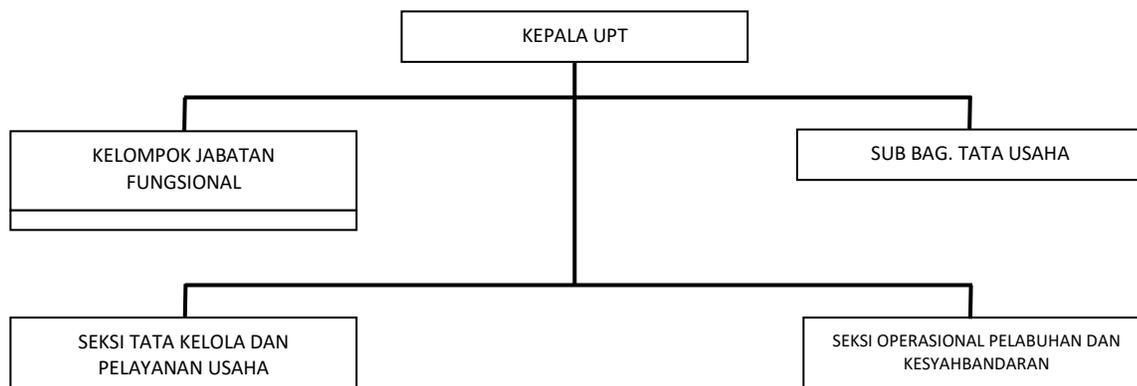
**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALBAR**



Gambar 2.2

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PELABUHAN PERIKANAN**

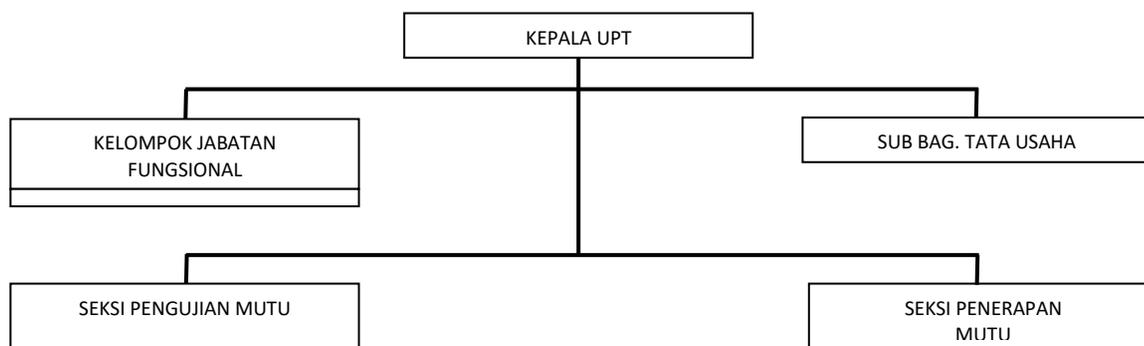
(Sesuai Pergub No. 89 Tahun 2017)



Gambar 2.3

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN (UPT - PMHP)**

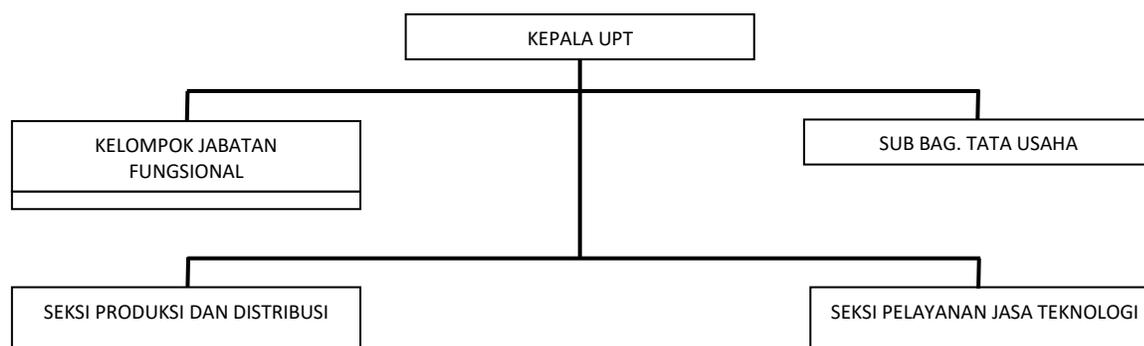
(Sesuai Pergub No. 90 Tahun 2017)



Gambar 2.4

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT PERIKANAN BUDIDAYA AIR PAYAU DAN LAUT (UPT PBAPL)**

(Sesuai Pergub No. 91 Tahun 2017)



## 2.2. SUMBERDAYA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT

### 2.2.1. Jumlah Pegawai

Jumlah pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun 2018 berjumlah 134 orang yang terdiri dari 95 orang berjenis kelamin laki-laki dan 39 orang berjenis kelamin perempuan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 2.1**

Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan prov. Kalbar berdasarkan kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, serta Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional TA. 2020

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JUMLAH PERSONIL		PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH PERSONIL		STRUKTURAL/FUNGSIONAL	JUMLAH PERSONIL	
S3	-	-	Pembina Utama	-	-	Eselon I/b	-	-
S2	17	Org	Pembina Utama Madya	-	-	Eselon II/a	1	Org
S1/DIV	57	Org	Pembina Utama Muda	1	Org	Eselon II/b	-	-
DIPLOMA III	17	Org	Pembina Tingkat I	5	Org	Eselon III/a	5	Org
DIPLOMA II	-	Org	Pembina	10	Org	Eselon III/b	3	Org
SMA/SMK	40	Org	Penata Tingkat I	37	Org	Eselon IV/a	24	Org
SMP	3	Org	Penata	9	Org	Eselon IV/b	-	Org
SD	3	Org	Penata Muda Tingkat I	24	Org	Fungsional Widyaiswara	-	-
			Penata Muda	7	Org	Fungsional Auditor	-	-
			Pengatur Tingkat I	30	Org	Fungsional Kepegawaian	-	-
			Pengatur	8	Org	Fungsional Arsiparis	-	-
			Pengatur Muda Tingkat I	1	Org	Dokter	-	-
			Pengatur Muda	1	Org	Bidan/Perawat	-	-
			Juru	4	Org	Fungsional Pranata Komputer	-	-
						Fungsional Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	6	Org
						Fungsional Umum /Pelaksana	98	Org
<b>JUMLAH</b>	<b>137</b>	<b>Org</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>137</b>	<b>Org</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>137</b>	<b>Org</b>

Sumber: DUK Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2020

### 2.2.2. Aset/Modal

Pada dasarnya sarana dan prasarana yang dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan urusan kelautan dan perikanan, telah tersedia gedung kantor yang memadai serta perlengkapannya yang masih baik, berikut sarana dan prasarana Dinas Kelautan dan Perikanan :

**Tabel 2.2.**  
**Data Inventaris Asset**

No.	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH AKHIR Desember 2020		KONDISI
		Jumlah		
		Barang	Nilai (Rp.)	
1	2	3	4	5
1	TANAH (KIB A)	18	667.317.984	Baik
2	PERALATAN DAN MESIN (KIB B)	1.184	17.620.687.502	Baik
3	GEDUNG DAN BANGUNAN (KIB C)	43	7.103.814.009	Baik
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN (KIB D)	7	706.712.355	Baik
5	ASET TETAP LAINNYA (KIB E)	8	104.438.872	Baik
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KIB F)	-	-	
	Jumlah	1.260	26.202.970.722	

Sumber data : Data Sementara Daftar Inventaris 2020

## 2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

### 2.3.1. Kinerja Pelayanan Sektor Kelautan dan Perikanan

Indikator kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat selama 5 (lima) tahun terakhir mengacu pada sasaran strategis seperti yang ditentukan dalam RPJMD dan Renstra serta Formulasi pengukuran kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan perbandingan antara realisasi terhadap target kuantitatif sasaran strategis, yaitu terhadap Indikator Kinerja pencapaian sasaran strategis tersebut. *Review* Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 2.3.

**Tabel 2.3.**

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1.	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan (%)				-	-	-	3.22	1.27-3.09	3.02	3.18	3.65	3.37	1.89	0.00	0.00	0.00	104.66	100.00
2	Jumlah Produksi Perikanan				227,555.40	251,750.72	276,478.42	249,614.34	254,606.63	202,293.18	240,294.37	248,698.73	246,178.25	234,216.25	88.90	95.45	89.95	98.62	91.99
3	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)				166,500.4	180,107.84	190,506.96	165,614.34	168,926.63	185,299.36	162,367.22	165,254.96	169,680.97	150,248.94	111.29	90.15	86.74	102.46	88.94
4	Jumlah Produksi Ikan Budidaya (ton)				61,055.00	71,642.88	85,971.46	84,000.00	85,680.00	65,551.13	76,961.14	83,443.26	76,489.28	83,967.31	107.36	107.42	97.06	91.06	98.00
5.	Nilai Tukar Perikanan (NTP) (%)				-	-	-	104.00	101.00	102.37	101.46	104.31	109.12	102.23	0.00	0.00	0.00	104.92	101.22
6	Meningkatnya Konsumsi Makan Ikan (Kg/org/thn)				35.32	36.03	38	39.05	39.1	36.43	36.43	38.91	39.53	46.16	103.14	101.11	102.39	101.23	0.00



### 2.3.2 Belanja Daerah

Belanja daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS. Sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan operasional serta pembangunan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Rasio Belanja Tidak Langsung tahun 2014-2018 berturut-turut sebesar 98,35%, 97,36%; 94,92%, 94,67% dan 99,28%. Adapun Rata-rata pertumbuhan Anggaran belanja tidak langsung sebesar 5,53 % dan realisasi 5,65 %. Adanya pegawai yang memasuki masa purna tugas menyebabkan rasio Belanja Tidak Langsung tidak terserap 100%. Sedangkan rasio Belanja Langsung tahun 2014-2018 berturut-turut sebesar 80,63 %, 88,97 %, 72,85 % , 92,40 % dan 92,88%. Adapun Rata-rata pertumbuhan Anggaran belanja langsung sebesar -1,57 % dan realisasi 8,76 %. Rendahnya rasio Belanja Langsung pada tahun 2016 disebabkan adanya proses gagal lelang pada Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap, Budidaya dan Pengolahan yang disebabkan adanya defisit keuangan daerah sehingga terjadi penundaan dan penghentian pengadaan barang dan jasa pemerintah. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini :

**Tabel 2.4.**  
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan PD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (Rp.)					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-Rata Pertumbu	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	2,232,793,800	2,230,241,450	1,917,330,212	3,079,000,080	2,653,736,057	1,868,375,906	1,917,654,114	1,745,016,183	2,890,927,467	2,395,992,835	83.68	85.98	91.01	93.89	90.29	5%	2%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	604,830,000	566,950,000	361,956,000	694,710,000	200,145,000	496,032,889	474,850,255	302,774,090	647,548,826	193,447,212	82.01	83.76	83.65	93.21	96.65	-17%	3%
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	54,650,000	91,025,000	155,650,000	100,800,000	7,600,000	53,300,000	91,025,000	155,650,000	100,800,000	6,606,659	97.53	100.00	100	100.09	86.93	-34%	1%
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	151,010,600	124,687,600	204,282,788	136,675,000	47,868,000	33,327,500	99,297,600	166,691,500	108,495,000	47,865,000	22.07	79.64	81.6	79.38	99.99	8%	29%
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	341,232,600	323,710,600	246,114,800	236,120,200	237,511,000	227,224,900	187,969,600	224,142,400	188,956,600	230,038,000	66.59	58.07	91.07	80.03	96.85	0%	4%
PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	130,768,000	143,932,000	98,526,000	75,160,000	26,283,500	98,739,400	125,444,000	93,136,100	71,099,836	26,283,500	75.51	87.16	94.53	94.6	100.00	-23%	5%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PERIKANAN BUDIDAYA	2,544,802,000	3,424,614,200	928,268,000	1,322,470,200	579,063,600	391,134,603	3,185,938,436	804,506,600	1,290,909,500	540,503,602	15.37	93.03	86.67	97.61	93.34	7%	45%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA PERIKANAN TANGKAP	2,254,033,500	2,893,963,900	1,682,679,450	2,843,473,400	2,363,882,250	507,651,600	2,512,903,215	1,452,149,350	2,824,715,900	2,341,700,050	22.52	86.83	86.3	99.34	99.06	36%	35%
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU DAN NILAI TAMBAH SERTA OPTIMALISASI PENGOLOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2,057,910,000	1,340,604,500	1,056,512,724	1,724,769,000	1,813,374,250	1,392,299,550	1,145,455,967	714,459,092	1,630,767,819	1,757,706,000	67.66	85.44	67.62	94.55	96.93	5%	7%
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	1,833,201,500	6,669,146,250	515,478,500	715,796,000	401,525,750	1,228,291,218	6,028,242,300	488,388,129	689,788,259	397,044,000	67.00	90.39	94.74	96.37	98.88	-20%	8%
PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PESISIR DAN PULAU PULAU KECIL	1,756,974,000	1,911,519,500	989,417,000	1,798,592,985	783,049,750	1,635,424,400	1,653,454,640	861,105,677	1,686,963,420	775,200,350	93.08	86.50	87.03	93.79	99.00	-14%	0%
Jumlah	13,962,206,000	19,720,395,000	8,156,215,474	12,727,566,865	9,114,039,157	7,931,801,966	17,422,235,127	7,008,019,121	12,130,972,627	8,712,387,208	56.81	88.35	85.92	95.31	95.59	2%	11%



## 2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Provinsi Kalimantan Barat dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa sumberdaya kelautan dan perikanan yang sangat melimpah, baik ditinjau dari sisi keragaman jenis maupun dari sisi kelimpahan stok sumberdaya ikannya yang didukung oleh kondisi lingkungan perairan yang masih sangat baik. Namun demikian, kondisi sumberdaya perikanan yang masih sangat baik tersebut tidak serta-merta memberikan dampak positif secara langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan Kalimantan Barat, khususnya; nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan.

Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Kalimantan Barat memiliki tantangan dan peluang. Berdasarkan hasil analisis terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan RI dan Renstra Kabupaten/Kota, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang berimplikasi terhadap perencanaan lima tahun ke depan. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

### 2.4.1 Tantangan

Tantangan (*threat*) adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Beberapa tantangan yang akan dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan adalah:

- 1) Ketergantungan masyarakat Kalimantan Barat yang cukup tinggi terhadap SDA dan lingkungan pesisir dan laut serta belum termanfaatkannya secara optimal sumberdaya jasa kelautan.
- 2) Degradasi lingkungan sensitive (mangrove, terumbu karang, dan padang lamun) dan penurunan mutu perairan.
- 3) Masih maraknya penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (destructive fishing) dan potensi konflik nelayan yang sangat tinggi.
- 4) Sebagian besar asset nelayan dan petambak tidak bersertifikat, sehingga sulit mengakses perbankan atau lembaga keuangan
- 5) Pengembangan teknologi produksi relative lambat dan stagnan.
- 6) Infrastruktur sektor perikanan dan kelautan (irigasi tambak, pelabuhan perikanan, sarana pengolahan dan armada penangkapan) masih terbatas.

- 7) Serangan hama dan penyakit belum dapat dikendalikan secara maksimal serta masih adanya penggunaan antibiotik dan bahan terlarang lainnya.
- 8) Rendahnya aksesibilitas dan, kualitas layanan antar pulau dan pembinaan pada pulau-pulau kecil.
- 9) Kesenjangan gender terhadap pembinaan dan pengembangan SDM kelompok baik di daerah pesisir maupun pada daerah pulau-pulau kecil
- 10) Masih banyaknya fasilitas pemerintah yang tidak berfungsi secara optimal, misalnya TPI, PPI, dll.
- 11) Kemiskinan berkepanjangan secara struktural, kultural terutama di desa nelayan.
- 12) Kerusakan lingkungan yang cukup parah (kerusakan fisik habitat ekosistem pesisir, pencemaran-sedimentasi dan abrasi pantai), perubahan iklim serta ancaman bencana alam (banjir, longsor, abrasi dan intrusi air laut).
- 13) Kesadaran masyarakat atas kelestarian lingkungan yang sangat rendah dan lemahnya.
- 14) penegakan hukum (*Law Enforcement*) serta rendahnya pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.
- 15) Pengetahuan dan keterampilan teknis aparat masih rendah.
- 16) Lemahnya dukungan perbankan dan lembaga keuangan.
- 17) Mutu produk yang masih rendah, Sistem pengendalian dan pengawasan mutu belum berjalan dengan baik.
- 18) Potensi konflik pemanfaatan ruang sangat besar (konflik Institusional, konflik sosial, konflik teknologi dll).

#### **2.4.2. Peluang**

Peluang (*opportunity*) adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Peluang-peluang (*opportunity*) yang dapat menjadi

*Peluang Sumberdaya Alam dan Kondisi Geografis:*

- 1) Belum termanfaatkannya seluruh potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Kalimantan Barat;
  - a. *Peluang Ekonomi, Pasar dan Industri:*
- 2) Tingginya permintaan ikan baik untuk memenuhi pasar dalam negeri maupun untuk ekspor serta pertumbuhan usaha perikanan rakyat ke usaha perikanan maju seiring dengan naiknya pamor perikanan sebagai sumberdaya pangan unggulan;

- 3) Adanya kebijakan pengembangan usaha Perikanan secara lebih sistemik serta memberdayakan usaha-usaha perikanan skala kecil;
  - 4) Peran pelaku usaha perikanan yang semakin meningkat dan proaktif, serta iklim dunia usaha yang semakin kondusif (termasuk aspek finansial, perbankan dan investasi);
  - 5) Pengembangan klaster usaha pengolahan hasil perikanan dalam bentuk UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang berbasis pada produk bernilai tambah dan memenuhi selera pasar;
  - 6) Peluang investasi pada bidang usaha pengolahan dan pemasaran dengan keunggulan jenis dan kualitas produk
  - 7) Adanya peluang investasi di pulau-pulau kecil yang dapat memacu penyediaan fasilitas yang memadai;
  - 8) Penyajian data dan informasi sumberdaya, sarana dan prasarana serta jaringan usaha di bidang kelautan dan perikanan Kalimantan Barat;
  - 9) Maraknya bantuan dari lembaga-lembaga donor luar negeri untuk membantu peningkatan mutu produksi hasil perikanan sehingga kondisi pemasaran (ekspor) menjadi lebih kondusif;
  - 10) Globalisasi / diberlakukannya pasar bebas membuka peluang pengembangan pemasaran hasil perikanan;
- a. Peluang Dukungan Pemerintah:*
- 11) Komitmen pemerintah dan payung hukum dalam membangun bidang Kelautan dan Perikanan termasuk penyempurnaan otonomi dan Peraturan Daerah;
  - 12) Adanya lembaga pemerintahan yang menangani sampai tingkat Kabupaten/Kota yang didukung *stakeholders*, termasuk di dalamnya kekayaan/Aset Barang Daerah dalam lingkup Kelautan dan Perikanan seperti: pelabuhan perikanan, sentra budidaya, pusat informasi dan jejaring usaha serta pariwisata.

### BAB.III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan memiliki permasalahan yang berpotensi mengancam kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, keberlanjutan mata pencaharian masyarakat di bidang perikanan dan ketahanan pangan. Penentuan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat menjadi awal dalam merumuskan isu-isu strategis. Isu-isu strategis tersebut akan sangat membantu dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan 5 (lima) tahun ke depan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pun akan lebih *reliable* dengan berdasar pada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Proses identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, didasarkan pula pada evaluasi terhadap capaian/kondisi saat ini, standar yang digunakan, faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi, sehingga akan muncul permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat selama 5 (lima) tahun ke belakang.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat antara lain :

1. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Yang Inovatif, Produktif, Lestari Dan Berkelanjutan
2. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya Yang Inovatif, Produktif, Lestari Dan Berkelanjutan
3. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan
4. Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir
5. Kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan relatif masih lemah, baik secara kuantitas dan kualitas

Pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut :

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Belum optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan melalui peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya), perbaikan sistem distribusi, ketersediaan sarana dan prasarana	1. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Tangkap Yang Inovatif, Produktif, Lestari Dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rata-rata pendapatan nelayan Kalbar masih rendah, Volume hasil tangkapan ikan rata-rata masih rendah</li> <li>2. Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap masih Terbatas seperti Ketersediaan BBM tidak merata untuk nelayan pergi melaut, terutama didaerah yang terpencil serta Ketersediaan Es untuk pendinginan ikan hasil tangkapan masih terbatas</li> <li>3. Kualitas SDM nelayan rata – rata masih rendah</li> <li>4. Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan tangkap terbatas</li> <li>5. Kemampuan sebagian besar armada perikanan tangkap di daerah hanya dapat beroperasi di perairan pantai, karena skalanya yang relatif kecil.</li> <li>6. Sarpras PPI/ Pelabuhan Perikanan belum memadai dan sebagian belum difungsikan secara baik.</li> </ol>
		2. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya Yang Inovatif, Produktif, Lestari Dan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaku usaha budidaya Ikan air payau dan laut Kalbar masih sangat rendah dibandingkan dengan potensinya yang tersedia</li> <li>2. Ketersediaan benih ikan unggul untuk Pembudidaya Ikan masih terbatas</li> <li>3. Kualitas SDM Pembudidaya Ikan rata-rata masih rendah</li> <li>4. Pencemaran dan wabah hama penyakit ikan di kawasan perikanan budidaya</li> <li>5. Ketersediaan pakan ikan masih tergantung dari luar kalbar dan Produksi pakan masih mengalami kendala kontinuitas pasokan bahan baku yang bermutu.</li> <li>6. Akses untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan budidaya terbatas.</li> </ol>

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2.	Daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan masih rendah;	3. Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan dan jaminan keamanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penurunan kualitas/ mutu produk perikanan saat penanganan dan pengolahan.</li> <li>2. Sistem logistik ikan belum tertata dengan baik</li> <li>3. Ekspor hasil perikanan Kalbar rendah</li> <li>4. Inovasi dan daya saing produk olahan hasil perikanan Kalbar masih rendah</li> <li>5. Produk perikanan banyak yang belum terpantau distribusi dan pemasarannya.</li> </ol>
3.	Pengelolaan tata ruang laut dan sumberdaya ikan belum optimal	5. Menurunnya daya dukung dan kerusakan ekosistem pesisir	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konflik pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan laut Kalbar antara pelaku usaha, masyarakat dan stake holder terkait</li> <li>2. Belum optimalnya pengelolaan kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif</li> <li>3. Kerusakan ekosistem wilayah pesisir dan laut (rusaknya ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang) Kalbar</li> <li>4. Upaya mitigasi bencana belum dilakukan secara terus menerus dan cenderung belum menampakan hasil</li> <li>5. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian ekosistem pesisir laut</li> <li>6. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.</li> </ol>
4.	Lemahnya kapasitas kelembagaan pengawas dan penegakan hukum Perikanan	4. Kondisi penegakan hukum untuk sektor perikanan relatif masih lemah, baik secara kuantitas dan kualitas	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Belum diberdayakannya petugas Pengawas Sumberdaya Ikan dan Pengawas Kapal Ikan secara optimal</li> <li>2. Kurangnya sarana dan SDM penegak hukum di laut</li> <li>3. Illegal, Unreported dan Unregulated Fishing di perairan Laut Kalbar masih marak</li> </ol>

### **3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Program dan Kegiatan perangkat daerah merupakan manifestasi atas visi, misi, dan program kerja Gubernur, sehingga perencanaan pembangunan daerah lima tahunan perangkat daerah harus disusun selaras dengan visi dan misi gubernur terpilih periode 2018–2023 serta mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional.

Sebagaimana tertuang pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 -2023, Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 adalah :

#### **TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan

tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance***, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
3. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 sehingga diperlukan sinergitas dan keterkaitan antara Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

### **3.3. TELAHAH RENSTRA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN DAN RENSTRA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Visi dan Misi KKP sesuai dengan Visi & Misi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024 sebagai berikut:

#### **Visi**

Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong.

#### **Misi**

- 1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia melalui Peningkatan Daya Saing SDM KP dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan
- 2) Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional
- 3) Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
- 4) Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP

Proyek Prioritas Strategis (Major Project) KKP sebagai Berikut :

1. Revitalisasi Tambak di Kawasan Sentra Produksi Udang dan Bandeng  
Meningkatkan produksi perikanan budidaya (ikan menjadi 10,32 juta ton, dan pertumbuhan ekspor udang 8% per tahun.
2. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional  
Meningkatkan produksi perikanan tangkap menjadi 10,10 juta ton, dan nilai ekspor hasil perikanan menjadi USD 8 miliar pada 2024.
3. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan  
Meningkatkan pendapatan petani dan nelayan rata-rata 5% dan 10% per tahun (target SDGs), serta produktivitas komoditas 5% per tahun.

Strategi Agenda Pembangunan Nasional yang terkait dengan tugas KKP sebagai berikut :

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas & berkeadilan
  - Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan;
  - Memperkuat komitmen pelaksanaan targetSDGs ke-14 yakni Ekosistem Lautan (Life Below Water);
  - Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil;
  - Industrialisasi;
  - Penguatan riset dan inovasi.
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

Penguatan basis produksi dan pengolahan komoditas unggulan daerah yang tersebar pada sentra-sentra hilirisasi pertanian dan perikanan di Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN), kawasan transmigrasi, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), dan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT)/Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Pada tahun 2020 terdapat 13 SKPT yaitu Natuna, Sebatik, Merauke, Saumlaki, Sabang, Sumba Timur, Rote Ndao, Mentawai, Morotai, Talaud, Moa, Biak, dan Timika.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
  - Pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi bidang kelautan dan perikanan;
  - Percepatan perbaikan gizi masyarakat melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan.
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan

Perlindungan dan penguatan kelembagaan masyarakat hukum adat, tradisional, dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil.

5. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
  - Konservasi kawasan dan perlindungan keanekaragaman hayati di daratan maupun pesisir;
  - Perlindungan kerentanan pesisir dan sektor kelautan;•Pengembangan rendah karbon pesisir dan laut.
6. Memperkuat Stabilitas Polhuk-hankam dan Transformasi Pelayanan Publik
  - Penguatan keamanan laut,
  - Pembangunan dan operasional armada PSDKP

Strategi Pelaksanaan Arah Kebijakan KKP sebagai berikut :

1. Memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan.
2. Mengoptimalkan dan memperkuat perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat
3. Membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah, untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil perikanan dan kelautan
4. Pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil serta penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait
5. Penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan

### **3.3 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 sebagaimana tercantum dalam dokumen RTRW bahwa penataan ruang diarahkan untuk mewujudkan pola ruang wilayah yang serasi dan seimbang dalam upaya pemanfaatannya, baik untuk ruang kawasan lindung maupun ruang untuk kawasan

budidaya sehingga dalam pengembangannya dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal sesuai dengan potensi dan kendala yang ada.

Kebijakan pembangunan kewilayahan di Kalimantan Barat tidak terlepas dari kebijakan kewilayahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Kebijakan kewilayahan tersebut merupakan hasil telaah terhadap struktur ruang wilayah yang telah disepakati bersama oleh seluruh *stakeholders* terkait pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di Kalimantan Barat. Hal tersebut sekaligus sebagai upaya menjangkau isu-isu lingkungan hidup strategis sebagai bahan penyusunan program kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kalimantan Barat.

Rencana pola ruang wilayah provinsi merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah provinsi yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Berdasarkan pada pengembangan kawasan budidaya, wilayah Provinsi Kalimantan Barat dikembangkan secara intensif untuk kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan perikanan, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman.

Kawasan peruntukan perikanan dikembangkan di a) Kabupaten Sambas di Kecamatan Pemangkat dan sekitarnya; b) Kota Singkawang di Kecamatan Singkawang Utara; c) Kabupaten Bengkayang di Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan; d) Kabupaten Mempawah di Kecamatan Mempawah Hilir dan Segedong; e) Kabupaten Kubu Raya di Kecamatan Sungai Kakap dan Teluk Pakedai; f) Kabupaten Kayong Utara di Kecamatan Pulau Maya dan Kepulauan Karimata; g) Kabupaten Ketapang di Kecamatan Matan Hilir Utara, Delta Pawan dan sekitarnya, serta Kendawangan; dan h) Kabupaten Kapuas Hulu di Kecamatan Jongkong dan sekitarnya.

Untuk menunjang pengembangan kawasan peruntukan perikanan, kelautan, dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud diatas :

1. pelabuhan perikanan nusantara (PPN) Pemangkat di Kabupaten Sambas yang direncanakan menjadi pelabuhan perikanan samudera (PPS);
2. pelabuhan perikanan pantai (PPP) Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara yang direncanakan menjadi PPN;
3. pelabuhan perikanan pantai (PPP) Sungai Rengas di Kabupaten Kubu Raya; d.pelabuhan pendaratan ikan (PPI) Mempawah di Kabupaten Mempawah yang direncanakan menjadi PPP; dan

4. PPI yang tersebar di: 1. Kabupaten Sambas sebanyak 6 (enam) PPI; 2. Kota Singkawang sebanyak 2 (dua) PPI; 3. Kabupaten Bengkayang sebanyak 8 (delapan) PPI; 4. Kabupaten Mempawah sebanyak 9 (sembilan) PPI; 5. Kota Pontianak sebanyak 1 (satu) PPI; 6. Kabupaten Kubu Raya sebanyak 8 (delapan) PPI; 7. Kabupaten Kayong Utara sebanyak 11 (sebelas) PPI; dan 8. Kabupaten Ketapang sebanyak 3 (tiga) PPI;

5. Rencana PPI Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.

Secara umum pengembangan tersebut berorientasi pada optimalisasi sumberdaya dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Secara regional dan lokal peruntukan kawasan budidaya harus mempunyai sinergi yang seimbang, baik secara pengembangan wilayah yaitu dengan penentuan pusat-pusat pertumbuhan dan pelayanan, tetapi juga memperhatikan potensi-potensi yang ada sebagai aset dan sumber pengembangan wilayah-wilayah baru terutama untuk di wilayah perdesaan. Sehingga diharapkan pengembangan kawasan budidaya tidak hanya memperhatikan keterkaitan antar wilayah tetapi juga memperhatikan harmonisasi perkotaan dan perdesaan. Khusus rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Peraturan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penyusunan perda RZWP-3-K harus diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi. Rencana Tata Ruang Wilayah dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 termasuk dalam Rencana Umum Tata Ruang yang secara hirarki terdiri dari RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kab/Kota. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah bertujuan untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil secara terpadu dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2019 Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2038 disebutkan sebagai berikut :

Cakupan wilayah wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil daerah terdiri atas:

- a. Ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan di wilayah pesisir; dan
- b. Ke arah laut sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai.

Alokasi Ruang Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Daerah untuk wilayah perairan laut 0-12 (nol sampai dengan dua belas) mil laut terdiri atas Kawasan Pemanfaatan Umum, Kawasan Konservasi; dan Alur Laut.

**1. Kawasan Pemanfaatan Umum terdiri atas:**

**a. Zona Pariwisata**, yang selanjutnya disebut KPU-W yang terdiri dari :

- Sub Alam Zona Wisata Bawah Laut, terdapat di perairan Pulau Sawi Kabupaten Ketapang; dan
- Sub Zona Wisata Pantai/Pesisir dan pulau-pulau kecil terdapat di antaranya : Pantai Kalimantan, Pantai Dungun Laut, Pantai Putri Serayi dan Pantai Tanjung Batu di Kabupaten Sambas, Pantai Samudera Indah, Kabupaten Bengkayang, Pantai Mak Jantu dan Pantai Pasir Panjang di Kota Singkawang , Pantai Kijing, Wisata Pulau Pendamaran, Wisata Pulau Setinjang dan Wisata Pulau Dato' di Kabupaten Mempawah, Pantai Tambak Rawang dan Pantai Pasir Mayang di Kabupaten Kayong Utara, Pantai Tanjung Belandang, Pantai Celincing, Pantai Tanjung Batu, Pantai Pagar Entimun, Pantai Sungai Tengar, Pantai Tanjung Gangse, Wisata Pulau Kucing, Wisata Pulau Jambat Kecil dan Pantai Selat Bilik Kabupaten Ketapang

**b. Zona Pelabuhan**, terdiri dari Pelabuhan Paloh, Pelabuhan Sintete di Kabupaten Sambas, Pelabuhan Singkawang di Kota Singkawang, Pelabuhan Pontianak di Kabupaten Mempawah, Pelabuhan Teluk Batang, dan Pelabuhan Telok Melano di Kabupaten Kayong ,Utara Pelabuhan Ketapang dan Pelabuhan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, PP Bakau Besar di Kabupaten Mempawah PP Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara.

**c. Zona Hutan Mangrove**, terdiri dari : Kec. Paloh, Kec. Tangaran, Kec. Jawai, Kec. Jawai Selatan, Kec. Pemangkat, Kec. Salatiga dan Kec. Selakau di Kabupaten Sambas. Kec. Singkawang Utara, Kec. Singkawang Barat dan Kec. Singkawang Selatan di Kota singkawang , Mempawah Hilir dan Kec. Sungai Pinyuh di Kabupaten Mempawah Kec. Simpang Hilir dan Kec. Sukadana di Kabupaten Kayong Utara, Kec. Matan Hilir Utara dan Kec. Muara Pawan di Kabupaten Ketapang.

**d. Zona Perikanan Tangkap terdiri dari** : zona perikanan tangkap pelagis dan demersal, terdapat diperairan : Selat Karimata dan Laut Jawa

**e. Zona Perikanan Budidaya** meliputi zona budidaya laut di Pulau Pelapis dan Pulau Bawal

**2. Kawasan Konservasi terdiri atas :**

a. Kawasan Konservasi Perairan; , terdapat di perairan Kecamatan Pulau Maya, Kabupaten Kubu Raya dan Kecamatan Teluk Batang dan Kecamatan Simpang Hilir di Kabupaten Kayong Utara

b. Kawasan Konservasi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdapat di perairan :

- KKP3K Taman Pesisir Paloh di Kabupaten Sambas
- KKP3K Taman Pulau-Pulau Kecil P. Randayan di Kabupaten Bengkayang
- KKP3K Taman Pesisir Kubu Raya di Kabupaten Kubu Raya
- KKP3K Taman Pulau-Pulau Kecil Kendawangan di Kabupaten Ketapang

Selain Kawasan Konservasi, di perairan Provinsi Kalimantan Barat terdapat kawasan lindung berupa Cagar Alam Laut Kepulauan Karimata.

**3. Alur Laut terdiri atas :**

a. Alur-pelayaran dan/atau perlintasan

- Alur-pelayaran dan/atau perlintasan khusus, terdapat di perairan Selat Karimata
- Alur-pelayaran dan/atau perlintasan lokal, terdapat di perairan Selat Karimata
- Alur-pelayaran dan/atau perlintasan regional, terdapat di perairan Selat Karimata dan Laut Jawa

b. Pipa/Kabel Bawah Laut

- Alur pipa minyak dan gas bawah laut ditetapkan di perairan sekitar Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah
- Alur kabel telekomunikasi bawah laut ditetapkan di perairan sekitar Kabupaten Sambas, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang

### 3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat; telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat; telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan telaah RTRW dan KLHS Kalimantan Barat, maka berikut ini adalah isu-isu strategis yang telah ditetapkan antara lain :

1. Belum optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Ikan melalui peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya), perbaikan sistem distribusi, ketersediaan sarana dan prasarana
2. Daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan masih rendah;
3. Pengelolaan tata ruang laut dan sumberdaya ikan di Kalimantan Barat belum optimal
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan pengawas dan penegakan hukum Perikanan

Untuk pengelolaan sumberdaya perikanan dan kelautan secara berkelanjutan maka dapat diidentifikasi isu strategis kondisi yang diharapkan pada periode lima tahun kedepan sebagaimana tabel 3.2. sebagai berikut :

Tabel 3.2. identifikasi isu strategis dan kondisi yang diharapkan pada periode lima tahun kedepan

ISU SEKTOR	KONDISI YANG DIHARAPKAN	INDIKATOR TUJUAN YANG CENDERUNG DIPENGARUHI
Belum optimalnya Pengelolaan Sumberdaya Ikan melalui peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya), perbaikan sistem distribusi, ketersediaan sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan alat tangkap ikan ramah lingkungan, dan Penggunaan alat bantu penangkapan dalam rangka peningkatan produktifitas penangkapan serta pemulihan habitat sumberdaya ikan laut kalbar dengan membangun rumah ikan buatan (rumpon).</li> <li>2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap di Provinsi Kalbar</li> <li>3. Sertifikasi keahlian nautika dan mesin kapal ikan untuk nelayan kalbar dan Peningkatan kapasitas nelayan/pelaku usaha perikanan tangkap</li> <li>4. Adanya Penyediaan akses yang mudah untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan Tangkap</li> <li>5. Revitalisasi nelayan tradisional melalui paket bantuan kapal perikanan , Alat tangkap dan mesin perikanan.</li> <li>6. Revitalisasi sarana - prasarana pangkalan pendaratan ikan / pelabuhan perikanan kewenangan provinsi dan mengoptimalkan fungsi pelayanan di pelabuhan perikanan kewenangan provinsi</li> </ol>	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan dan percontohan komoditas ikan unggul payau dan laut : Laut : Kakap Putih, Kerapu, Bawal bintang dan rumput laut Payau : Udang vanamei, Udang Windu, Bandeng, Nila</li> </ol>	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Salin, Rumput laut (<i>Gracilaria</i>) dan Kepiting bakau</li> <li>2. Revitalisasi sarana-prasarana balai budidaya ikan payau dan laut kalbar.</li> <li>3. Penerapan cara budidaya ikan yang baik (CBIB) cara pembenihan ikan yang baik (CPIB)/ (Indo GAP).</li> <li>4. Pengendalian hama, penyakit, residu, obat-obatan dan pakan serta monitoring lingkungan berbasis kawasan</li> <li>5. Penyediaan sarana prasarana dan percontohan pakan ikan mandiri.</li> <li>6. Adanya penyediaan akses yang mudah untuk permodalan bagi pengembangan usaha perikanan Budidaya</li> </ol>	
<p>Daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan masih rendah;</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membangun sistem rantai dingin (cool chain system) produk kelautan dan perikanan serta Pembinaan dan pengembangan standar mutu di pusat-pusat perikanan melalui pengembangan rantai dingin</li> <li>2. Pengembangan sistem logistik ikan daerah untuk menghindari kelangkaan stok produk kelautan dan perikanan di saat paceklik</li> <li>3. Promosi secara terintegrasi dan intensif dan ekspor hasil perikanan serta Pengenalan paket teknologi pengolahan hasil perikanan.</li> <li>4. Pelatihan/apresiasi nilai tambah perikanan dan bantuan sarana produksi pengolahan dan pemasaran dan alat pengolahan ikan</li> <li>5. Pemantauan kualitas produk perikanan secara berkala ke unit pengolahan di daerah</li> </ol>	<p>Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan</p>
<p>Pengelolaan tata ruang laut dan sumberdaya ikan di Kalimantan Barat belum optimal</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berpedoman pada rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil kalbar (RZWP3K)</li> <li>2. Penetapan kawasan konservasi perairan laut daerah dan Penyelesaian penyusunan rencana pengelolaan kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif</li> <li>3. Rehabilitasi dan pembangunan prasarana kawasan konservasi perairan atau kawasan konservasi pesisir dan pulau - pulau kecil dan prasarana di pulau pulau kecil</li> <li>4. Peningkatan Pemahaman dan Kecintaan terhadap Budaya Kelautan dan Perikanan kepada Masyarakat Kalbar</li> <li>5. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Fasilitasi sarana dan prasarana masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.</li> </ol>	<p>Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan</p>
<p>Lemahnya kapasitas kelembagaan pengawas dan penegakan hukum Perikanan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada kegiatan IUU Fishing di perairan Kalimantan Barat</li> <li>2. Pendayagunaan lembaga pengawasan pusat yang ada di daerah seperti Satker Pengawasan di Sei Rengas, PPN Pemangkat, PPP Teluk Batang dan pengadilan perikanan dan melengkapi fasilitas pengawasan seperti komunikasi dan kapal pengawasan serta koordinasi dan pelatihan terhadap SDM pengawasan di kab/kota.</li> <li>3. Peningkatan sarana dan prasarana Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas kelembagaan pengawas dan penegakan hukum yang kuat dan efektif</li> <li>4. Pengembangan Sistem Pengawasan Masyarakat Sumberdaya Kelautan Perikanan (POKMASWAS)</li> </ol>	<p>Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan</p>

## **BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Adanya perubahan tatanan global, nasional dan regional yang berkembang dinamis menuntut upaya percepatan pembangunan kelautan dan perikanan secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan menghadapi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut.

Munculnya kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan : mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Langkah strategis yang akan dilakukan dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan nasional dan daerah berorientasi kelautan dengan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut secara optimal, dan membangun ekonomi kelautan dan perikanan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan memperhatikan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diberikan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 direncanakan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

#### **4.1. 1. TUJUAN**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai.

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang akan dicapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan
2. Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan
3. Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah

## **BAB. IV TUJUAN DAN SASARAN**

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Adanya perubahan tatanan global, nasional dan regional yang berkembang dinamis menuntut upaya percepatan pembangunan kelautan dan perikanan secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan menghadapi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut.

Munculnya kesadaran untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, termuat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan : mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. Langkah strategis yang akan dilakukan dalam mewujudkan hal tersebut adalah dengan menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan nasional dan daerah berorientasi kelautan dengan meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan, mengelola wilayah laut secara optimal, dan membangun ekonomi kelautan dan perikanan secara terpadu dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan memperhatikan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diberikan, pembangunan sektor kelautan dan perikanan tahun 2018 sampai dengan tahun 2023 direncanakan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

### **4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

#### **4.1. 1. TUJUAN**

Tujuan adalah pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat, memecahkan permasalahan yang dihadapi, dan menangani isu strategis daerah yang ada. Tujuan harus bersifat realistis dan dapat dicapai.

Tujuan dalam Renstra ini diartikan sebagai sesuatu yang akan dicapai dan merupakan penjabaran dari pokok-pokok misi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat.

Tujuan jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan
2. Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan

#### **4.1.2. SASARAN**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, sehingga tujuan dapat dijabarkan lebih dari satu sasaran.

Sasaran jangka menengah Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan
2. Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
3. Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat Periode Tahun 2018 s/d 2023 beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel. 4.1 sebagai berikut:

**Tabel 4.1.**  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan		Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan (Persen)	3.65	3.37	1,27 - 3,09	3,73 - 4,29	3,92 - 4,52	4,09 - 4,64	4,09 - 4,64
		Meningkatnya produksi perikanan	Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	248,482	249,614	221,730	227,625	233,681	239,903	239,903
		Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai RB Dinas Kelautan dan Perikanan	BB	-	-	BB	BB	BB	BB
			Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan	BB	-	-	BB	BB	BB	BB
2	Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan		NTP Perikanan (%)	103.5	104.0	101.0	102.0	103.0	104.0	104
		Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan	Indeks Harga yang diterima Subsektor Perikanan	-	-	-	105	106	107	107

## **BAB V** **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi dan arah kebijakan dalam bab ini dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan sektor kelautan dan perikanan dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat guna Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan.

Strategi yang akan diambil dalam menjawab permasalahan-permasalahan pembangunan sektor kelautan dan perikanan adalah :

1. Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan tangkap serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap;
2. Penggunaan benih , induk unggul dan pakan yang didukung penerapan teknologi Budidaya sesuai standar serta lingkungan perairan yang kondusif;
3. Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor;
4. Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berpedoman pada RZWP3K dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil;
5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan Pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, peningkatan kesadaran dalam mengurus izin dan pencegahan konflik.
6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN

Sebagai tindak lanjut dari 5 (lima) strategi yang ditetapkanlah arah kebijakan yang lebih bersifat operasional yang diharapkan mampu menyelesaikan akar permasalahan yang dihadapi masyarakat selama ini. Arah kebijakan yang akan diambil dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah:

1. Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan dan lestari untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan Sarana Prasarana , Inovasi Teknologi Tepat Guna, peningkatan Kualitas SDM serta pengembangan kelembagaan bidang perikanan tangkap
2. Peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, Intensifikasi dan extensifikasi perikanan budidaya , peningkatan sarana dan prasarana serta Pengembangan produksi benih sebar/calon induk
3. Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku, peningkatan konsumsi ikan, peningkatan produk yang

memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologi, sanitasi dan higien.

4. Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan peningkatan upaya rehabilitasi serta pengelolaan kawasan konservasi perairan laut.
5. Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan
6. Meningkatkan akuntabilitas kinerja ASN Dinas Kelautan dan Perikanan

**Tabel 5.1.**

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<b>Visi : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan</b>
<b>Misi 4 : Mewujudkan Masyarakat Sejahtera</b>

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4
1. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan	1.1. Meningkatkan produksi perikanan	1.1.1 Peningkatan produksi dan produktivitas perikanan tangkap serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap	Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan dan lestari untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan Sarana Prasarana , Inovasi Teknologi Tepat Guna, peningkatan Kualitas SDM serta pengembangan kelembagaan bidang perikanan tangkap
		1.1.2 Penggunaan benih , induk unggul dan pakan yang didukung penerapan teknologi Budidaya sesuai standar serta lingkungan perairan yang kondusif	Peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, Intensifikasi dan extensifikasi perikanan budidaya , peningkatan sarana dan prasarana serta Pengembangan produksi benih sebar/calon induk
	Meningkatnya Implementasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	3.1.1 Peningkatan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Sistem manajemen kinerja yang baik
		3.1.1 Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan melalui Sistem manajemen kinerja yang baik
2. Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha	2.1 Meningkatkan Pendapatan Pelaku Usaha	2.1.1 Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha	Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku, peningkatan konsumsi ikan, peningkatan produk

TUJUAN RENSTRA	SASARAN RENSTRA	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Perikanan	Perikanan	pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor	yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologi, sanitasi dan higien.
		2.1.2 Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berpedoman pada RZWP3K dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau Pulau Kecil	Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan peningkatan upaya rehabilitasi serta pengelolaan kawasan konservasi perairan laut
		2.1.3 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan Pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, peningkatan kesadaran dalam mengurus izin dan pencegahan konflik.	Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan

## BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB 6 ini, menjelaskan tentang rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan kurang waktu 5 tahun kedepan, dan menjelaskan indikator kinerja masing-masing program/kegiatan untuk pencapaian target, kelompok sasaran program serta pendanaan yang akan diusulkan.

Dalam perkembangan periode waktu lima tahun, upaya mewujudkan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi sektor kelautan dan perikanan, dan Mewujudkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan serta pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan di Kalimantan Barat, dilaksanakan melalui program sebagaimana tertera dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, dan mengacu pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga terjadi perubahan nomenklatur pada program pokok. Adapun 5 program pokok untuk Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1 Perubahan Nomenklatur Program Pokok Dinas Kelautan dan Perikanan

No	PMDN Nomor 13	kode 90	PMDN Nomor 90
	Tahun 2006		Tahun 2019
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
2	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3	PROGRAM PENGOLAHAN, PEMASARAN DAN PENINGKATAN MUTU HASIL PERIKANAN	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
4	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
5	PROGRAM PENGAWASAN SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Sedangkan untuk program kesekretariatan didukung oleh 1 (satu) Program yaitu **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.**

Rencana program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari RPJMD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang diambil dari program yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah. Program prioritas dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan pada satu urusan pilihan (kelautan dan perikanan).

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Sub kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada **Tabel 6.2. *Sebagaimana disajikan Terlampir.***

**Tabel 6.2 RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**  
**Rencana Strategis Perubahan Perangkat Daerah Dinas Kelautan Dan Perikanan**  
**Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 - 2023**

Tujuan	Sasaran	Kode	Nama Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Nama Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kondisi Awal	2019		2020		2021		2022		2023		Target Akhir Periode	Unit PD Penanggung Jawab	Lokasi
						Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.	Targe t	Rp.			
		3.25.0.00.0.00.01.0000	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN															
Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi sub sektor perikanan				Laju Pertumbuhan PDRB Subsektor Perikanan (persen)	3.65	3.37	0	1,27-3,09	0	3,73-4,29	0	3,92-4,52	0	4,09-4,64	0	4,09-4,64		
	Meningkatnya produksi perikanan			Jumlah Produksi Perikanan (Ton)	248,482	249,614	-	221,730	-	227,625	-	233,681	-	239,903	-	239,903		
Meningkatnya Kesejahteraan Pelaku Usaha Perikanan				NTP Perikanan (%)	103.5	104	-	101	-	102	-	103	-	104	-	104		
	Meningkatnya Pendapatan Pelaku Usaha Perikanan			Indeks Harga yang diterima Subsektor Perikanan	n/a	n/a	-	n/a	-	105	-	106	-	107	-	107		
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSENTASE KAWASAN RUANG LAUT DAN KONSERVASI YANG DIKELOLA	N/A	N/A	0	N/A	0	30	0	40	0	50	0	50		
		3.25.02.1.01	PENGELOLAAN RUANG LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI	JUMLAH KAWASAN RUANG LAUT DAN KONSERVASI YANG DI KELOLA	N/A	N/A	0	N/A	0	3	0	4	0	5	0	5		
		3.25.02.1.01.01	PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	JUMLAH DOKUMEN PETUNJUK PELAKSANAAN DAN SOSIALISASI RZWP3K	N/A	N/A	0	N/A	0	2	78.575.943	2	82.505.115	2	86.630.370	2	DKP-PROV	
		3.25.02.1.01.02	PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL BERDASARKAN PENETAPAN DARI PEMERINTAH PUSAT	JUMLAH KAWASAN KONSERVASI YANG DIKELOLA	N/A	N/A	0	N/A	0	3	1.650.513.087	3	511.220.115	4	536.781.120	4	DKP-PROV	
		3.25.02.1.01.03	REHABILITASI WILAYAH PERAIRAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	JUMLAH WILAYAH PERAIRAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG DI REHABILITASI	N/A	N/A	0	N/A	0	2	228.360.081	2	262.786.125	2	275.925.431	2	DKP-PROV	
		3.25.02.1.01.04	MITIGASI BENCANA WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	JUMLAH WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG DIMITIGASI	N/A	N/A	0	N/A	0	3	308.594.338	4	524.430.375	5	550.651.893	5	DKP-PROV	
		3.25.02.1.02	PENERBITAN IZIN PEMANFAATAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI	JUMLAH UNIT USAHA PEMANFAATAN RUANG LAUT YANG DI FASILITASI LAYANAN PERUJINANNYA	N/A	N/A	0	N/A	0	7	0	7	0	7	0	7		
		3.25.02.1.02.01	PENETAPAN PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENERBITAN IZIN LOKASI DAN IZIN PENGELOLAAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI	JUMLAH DOKUMEN PENETAPAN PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENERBITAN IZIN LOKASI DAN IZIN PENGELOLAAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI	N/A	N/A	0	N/A	0	0	0	6	40.000.000	6	42.000.000	6	DKP-PROV	
		3.25.02.1.02.02	PENERBITAN REKOMENDASI IZIN LOKASI DAN IZIN PENGELOLAAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI	JUMLAH REKOMENDASI IZIN LOKASI DAN IZIN PENGELOLAAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI	N/A	N/A	0	N/A	0	7	58.677.123	7	74.977.875	7	78.726.768	7	DKP-PROV	
		3.25.02.1.02.03	PELAKSANAAN FASILITASI PENERBITAN REKOMENDASI IZIN LOKASI DAN IZIN PENGELOLAAN RUANG LAUT DI BAWAH 12 MIL DI LUAR MINYAK DAN GAS BUMI BAGI MASYARAKAT LOKAL DAN TRADISIONAL	JUMLAH KABUPATEN YANG DIFASILITASI PENERBITAN REKOMENDASI IZIN LOKASI DAN IZIN PENGELOLAAN RUANG LAUT	N/A	N/A	0	N/A	0	7	50.565.220	7	66.315.375	7	69.631.143	7	DKP-PROV	
		3.25.02.1.02.04	PENERBITAN REKOMENDASI IZIN PELAKSANAAN REKLAMASI DI PERAIRAN PESISIR	JUMLAH REKOMENDASI YANG DITERBITKAN	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	20.000.000	1	DKP-PROV	
		3.25.02.1.02.05	PENCATATAN DAN PENGADMINISTRASIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DALAM SISTEM KADASTER LAUT	JUMLAH DOKUMEN PENCATATAN DAN PENGADMINISTRASIAN IZIN LOKASI PERAIRAN DALAM SISTEM KADASTER LAUT	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	2	230.000.000	2	240.000.000	2	DKP-PROV	
		3.25.02	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	PERSENTASE DESA PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL YANG DI BERDAYAKAN	N/A	N/A	0	N/A	0	20	0	30	0	40	0	40		
		3.25.02.1.03	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	JUMLAH KELOMPOK MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG DIBERDAYAKAN DAN DIBINA	N/A	N/A	0	N/A	0	25	0	26	0	27	0	27		
		3.25.02.1.03.01	PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	JUMLAH MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG DIKEMBANGKAN KAPASITASNYA	N/A	N/A	0	N/A	0	50	50.000.000	50	52.000.000	50	55.000.000	50	DKP-PROV	

				JUMLAH PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL YANG DISERAHKAN	N/A	N/A	0	N/A	0	8	900.000.000	10	1.000.000.000	12	1.200.000.000	12	DKP-PROV		
	3.25.02.1.03.02	PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		JUMLAH PESERTA PENGUATAN DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	N/A	N/A	0	N/A	0	50	74.808.142	50	112.318.500	50	117.934.425	50	DKP-PROV		
	3.25.02.1.03.03	PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL		JUMLAH PESERTA PERTEMUAN PENYUSUNAN PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	N/A	N/A	0	N/A	0	50	79.699.910	50	94.074.750	50	98.778.487	50	DKP-PROV		
	3.25.02.1.03.04	PEMBERIAN PENDAMPINGAN, KEMUDAHAN AKSES ILMU PENGETAHUAN, TEKNOLOGI DAN INFORMASI, SERTA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN		JUMLAH PESERTA BIMTEK MASYARAKAT PESISIR DAN PULAU- PULAU KECIL	N/A	N/A	0	N/A	0	50	111.600.722	50	121.448.250	50	127.520.662	50	DKP-PROV		
	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP		PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP	165254.98	165614.34	0	146000	0	150300	0	154891	0	159538	0	159538.00			
	3.25.03.1.01	PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL		JUMLAH KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUB) NELAYAN YANG MENERIMA BANTUAN SARANA DAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP	N/A	N/A	0	N/A	0	10	0	12	0	14	0	14			
	3.25.03.1.01.01	PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA IKAN		JUMLAH DOKUMEN DATA DAN INFORMASI SUMBERDAYA IKAN	1	N/A	0	N/A	0	1	321.607.241	1	384.681.760	1	403.915.848	1	DKP-PROV		
	3.25.03.1.01.02	PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP		JUMLAH PRASARANA PERIKANAN TANGKAP YANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT	N/A	N/A	0	N/A	0	8	1.408.191.681	9	1.177.466.337	10	3.417.589.519	10	DKP-PROV		
	3.25.03.1.01.03	PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP		JUMLAH SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP YANG DISERAHKAN KEMASYARAKAT	N/A	N/A	0	N/A	0	20	2.328.699.034	21	3.417.589.519	22	3.588.468.955	22	DKP-PROV		
	3.25.03.1.02	PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI					0		0										
	3.25.03.1.02.01	PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI SUMBER DAYA IKAN					0		0										DKP-PROV
	3.25.03.1.02.02	PENYEDIAAN PRASARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP					0		0										DKP-PROV
	3.25.03.1.02.03	PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA USAHA PERIKANAN TANGKAP					0		0										DKP-PROV
	3.25.03.1.03	PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT		JUMLAH KAPAL PERIKANAN TANGKAP 10 SD 30 GT YANG BERIZIN DAN TERCATAT SESUAI DENGAN PERATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU	N/A	N/A	0	N/A	0	174	0	175	0	176	0	176			
	3.25.03.1.03.01	PENETAPAN PERSYARATAN DAN PROSEDUR IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT		JUMLAH PESERTA PERTEMUAN KOORDINASI TEKNIS PERIKANAN TANGKAP	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	30	30.000.000	30	32.000.000	60	DKP-PROV		
	3.25.03.1.03.02	PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT		JUMLAH REKOMENDASI PERTIMBANGAN TEKNIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN TANGKAP	N/A	N/A	0	N/A	0	174	117.964.911	175	142.441.572	176	149.563.650	176	DKP-PROV		
	3.25.03.1.03.03	PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN DI ATAS 10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT		DOKUMEN DATA DAN INFORMASI USAHA PERIKANAN TANGKAP	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	50.000.000	1	DKP-PROV		
	3.25.03.1.04	PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT YANG BUKAN DIMILIKI OLEH NELAYAN KECIL		PERSENTASE JUMLAH PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP YANG MEMENUHI PERSYARATAN YANG BERLAKU	N/A	N/A	0	N/A	0	100	0	100	0	100	0	100			
	3.25.03.1.04.01	PENETAPAN PERSYARATAN DAN PROSEDUR IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT YANG BUKAN DIMILIKI OLEH NELAYAN KECIL		DOKUMEN SOP PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	20.000.000	1	DKP-PROV		
	3.25.03.1.04.02	PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA PERIKANAN TANGKAP UNTUK KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT YANG BUKAN DIMILIKI OLEH NELAYAN KECIL		JUMLAH KAPAL PERIKANAN TANGKAP < 10 GT YANG TERDAFTAR/ TERCATAT SESUAI DENGAN PERATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU	N/A	N/A	0	N/A	0	200	91.768.480	201	96.356.904	202	101.174.749	202	DKP-PROV		
	3.25.03.1.05	PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT DI LAUT, SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI		JUMLAH KAPAL PERIKANAN TANGKAP < 10 GT YANG TERDAFTAR/ TERCATAT SESUAI DENGAN PERATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU	N/A	N/A	0	N/A	0	200	0	201	0	202	0	202			

		3.25.03.1.05.01	PENETAPAN PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT	DOKUMEN SOP PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT	N/A	N/A	0	N/A	0	0	0	0	0	1	20.000.000	1	DKP-PROV	
		3.25.03.1.05.02	PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT	JUMLAH DOKUMEN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN YANG DITERBITKAN	N/A	N/A	0	N/A	0	200	80.387.826	202	96.356.904	204	101.174.749	204	DKP-PROV	
		3.25.03.1.06	PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI	JUMLAH PELABUHAN YANG DIKELOLA PROVINSI	N/A	N/A	0	N/A	0	7	0	7	0	7	0	7		
		3.25.03.1.06.01	PENENTUAN LOKASI PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN	DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI	N/A	N/A	0	N/A	0	2	237.883.636	2	260.079.919	2	273.083.915	2	DKP-PROV	
		3.25.03.1.06.02	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN PERIKANAN	JUMLAH PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI	N/A	N/A	0	N/A	0	15	152.551.836	15	171.038.896	15	179.590.812	15	DKP-PROV	
		3.25.03.1.06.03	PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN	JUMLAH DOKUMEN DATA PELABUHAN DAN INFORMASI PENDISTRIBUSIAN BBM	N/A	N/A	0	N/A	0	2	140.062.331	2	263.241.522	2	276.403.597	2	DKP-PROV	
		3.25.03.1.07	PENERBITAN IZIN PENGADAAN KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN DENGAN UKURAN DI ATAS 10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT	JUMLAH KAPAL PERIKANAN TANGKAP YANG DISETUJUI PENGADAANNYA	N/A	N/A	0	N/A	0	60	0	62	0	64	0	64		
		3.25.03.1.07.02	PENERBITAN PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN DENGAN UKURAN DI ATAS 10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT	JUMLAH REKOMENDASI REKOMENDASI PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PERIKANAN TANGKAP 10 SD 30 GT	N/A	N/A	0	N/A	0	60	43.551.626	61	59.555.633	62	62.533.414	62	DKP-PROV	
		3.25.03.1.08	PENERBITAN IZIN PENGADAAN KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN DENGAN UKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT DI LAUT, SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	JUMLAH KAPAL YANG MENDAPATKAN REKOMENDASI TEKNIS PENGADAAN KAPAL PERIKANAN SAMPAI DENGAN 10 GT	N/A	N/A	0	N/A	0	100	0	102	0	104	0	104		
		3.25.03.1.08.02	PENERBITAN PERSETUJUAN PENGADAAN KAPAL PENANGKAP IKAN DAN KAPAL PENGANGKUT IKAN DENGAN UKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT	JUMLAH REKOMENDASI TEKNIS PENGADAAN KAPAL PERIKANAN SAMPAI DENGAN 10 GT	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	100	40.000.000	110	45.000.000	110	DKP-PROV	
		3.25.03.1.09	PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN DI ATAS 10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT	JUMLAH KAPAL PERIKANAN 10 SD 30 GT YANG TERDAFTAR	N/A	N/A	0	N/A	0	50	0	52	0	54	0	54		
		3.25.03.1.09.01	PENETAPAN PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN DENGAN UKURAN DI ATAS 10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT	DOKUMEN SOP PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN DENGAN UKURAN DI ATAS 10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT	N/A	N/A	0	N/A	0	0	0	1	20.000.000	1	22.000.000	1	DKP-PROV	
		3.25.03.1.09.02	PENERBITAN PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN DENGAN UKURAN DI ATAS 10 GT SAMPAI DENGAN 30 GT	JUMLAH BUKU KAPAL PERIKANAN UKURAN 10 SD 30 GT	N/A	N/A	0	N/A	0	50	79.422.681	55	94.479.389	60	99.203.357	60	DKP-PROV	
		3.25.03.1.10	PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT YANG BEROPERASI DI LAUT, SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	JUMLAH PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN DENGAN UKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	100	0	110	0	110		
		3.25.03.1.10.02	PENERBITAN PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN DENGAN UKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT	JUMLAH DOKUMEN PENDAFTARAN KAPAL PERIKANAN DENGAN UKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	100	20.000.000	110	30.000.000	110	DKP-PROV	
		3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	PRODUKSI PERIKANAN YANG DIDARITKAN DI PELABUHAN PERIKANAN	4704.92	4750	0	4800	0	4850	0	4900	0	5000	0	5000		UPT-PP
		3.25.03.1.06	PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN SERTA PENGELOLAAN PELABUHAN PERIKANAN PROVINSI	JUMLAH ITEM RETRIBUSI YANG DIMANFAATKAN OLEH PELAKU USAHA	N/A	N/A	0	N/A	0	16	0	16	0	16	0	16		UPT-PP
		3.25.03.1.06.02	PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN PERIKANAN	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PELABUHAN YANG DI SEDIAKAN	N/A	N/A	0	N/A	0	5	5.462.541.550	5	6.008.795.705	5	6.609.975.275	5	DKP-PROV	
		3.25.03.1.06.03	PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN DAN PENGUSAHAAN PELABUHAN PERIKANAN	JUMLAH FREKUENSI BONGKAR MUAT KAPAL PERIKANAN	N	N	0	810	0	1100	317.629.426	1235	349.392.369	1400	384.331.606	1400	DKP-PROV	
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKSI PERIKANAN BUDIDAYA	83227.39	8400.00	0	75730.002	0	77244.60	0	78789.49	0	80365.28	0	80365.28		DKP-PROV
		3.25.04.1.01	PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	JUMLAH USAHA PERIKANAN BUDIDAYA YANG SUDAH MEMPUNYAI IZIN	N/A	N/A	0	N/A	0	27	0	28	0	29	0	29		DKP-PROV
		3.25.04.1.01.01	PENETAPAN PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN	JUMLAH KEGIATAN RAPAT KOORDINASI PENETAPAN PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN	N/A	N/A	0	N/A	0	0	0	1	30.000.000	1	31.000.000	1	DKP-PROV	
		3.25.04.1.01.02	PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA PERIKANAN BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN	JUMLAH REKOMENDASI CBIB DAN CPBIB YANG DITERBITKAN	N/A	N/A	0	N/A	0	27	70.661.998	28	86.896.084	29	91.240.887	29	DKP-PROV	

		3.25.04.1.02	PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN DI BIDANG PEMBUDDIDAYAAN IKAN YANG USAHANYA DI LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL SERTA TIDAK MENGGUNAKAN MODAL ASING DAN/ATAU TENAGA KERJA ASING	JUMLAH UNIT USAHA YANG DIREKOMENDASIKAN UNTUK PENERBITAN IZIN USAHA PERIKANAN	N/A	N/A	0	N/A	0	3	0	3	0	3	0	3	DKP-PROV	
		3.25.04.1.02.02	PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA PERIKANAN BIDANG PEMBUDDIDAYAAN IKAN	JUMLAH REKOMENDASI TEKNIS IZIN USAHA PERIKANAN	N/A	N/A	0	N/A	0	3	64.728.415	3	76.274.310	3	80.088.025	3	DKP-PROV	
		3.25.04.1.04	PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDDIDAYAAN IKAN KECIL (TDPIK) DI LAUT DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	JUMLAH TANDA DAFTAR PEMBUDDIDAYAAN TDP YANG DITERBITKAN	N/A	N/A	0	N/A	0	0	0	5	0	6	0	6	DKP-PROV	
		3.25.04.1.04.02	PENERBITAN TANDA DAFTAR BAGI PEMBUDDIDAYAAN IKAN KECIL (TDPIK) DI LAUT DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	JUMLAH REKOMENDASI YANG DITERBITKAN	N/A	N/A	0	N/A	0	0	0	5	23.000.000	6	25.000.000	6	DKP-PROV	
		3.25.04.1.05	PENGELOLAAN PEMBUDDIDAYAAN IKAN DI LAUT	PERSENTASE PENINGKATAN USAHA PEMBUDDIDAYAAN IKAN DI LAUT	N/A	N/A	0	N/A	0	3	0	3	0	3	0	3	DKP-PROV	
		3.25.04.1.05.01	PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI PEMBUDDIDAYAAN IKAN DI LAUT DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DOKUMEN DATA DAN INFORMASI PEMBUDDIDAYAAN IKAN DI LAUT DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	N/A	N/A	0	N/A	0	1	301.000.165	1	326.102.931	1	342.408.077	1	DKP-PROV	
		3.25.04.1.05.02	PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDDIDAYAAN IKAN DI LAUT	JUMLAH SARANA PEMBUDDIDAYAAN LAUT YANG DIADAKAN	N/A	N/A	0	N/A	0	0	0	0	0	1	400.000.000	1	DKP-PROV	
		3.25.04.1.05.03	PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDDIDAYAAN IKAN DI LAUT DAN AIR TAWAR YANG PENGGUNAAN SUMBER DAYANYA LEBIH EFISIEN	JUMLAH PRASARANA PEMBUDDIDAYAAN IKAN DI LAUT DAN AIR TAWAR YANG DISERAHKAN KE MASYARAKAT	N/A	N/A	0	N/A	0	2	184.482.970	2	346.066.471	2	363.369.794	2	DKP-PROV	
		3.25.04.1.05.04	PENJAMINAN KETERSEDIAAN SARANA PEMBUDDIDAYAAN IKAN DI LAUT	JUMLAH SARANA PEMBUDDIDAYAAN IKAN DI LAUT	N/A	N/A	0	N/A	0	10	1.620.275.530	11	659.741.880	12	692.728.974	12	DKP-PROV	
		3.25.04.1.05.05	PENYEDIAAN SARANA PEMBUDDIDAYAAN IKAN DI LAUT DAN AIR TAWAR YANG PENGGUNAAN SUMBER DAYANYA LEBIH EFISIEN APABILA DILAKUKAN OLEH DAERAH PROVINSI DAN/ATAU DAMPAK NEGATIFNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH BANTUAN SARANA PEMBUDDIDAYAAN IKAN (PEMBENIHAN DAN PEMESARAN)	N/A	N/A	0	N/A	0	5	353.752.105	5	385.030.984	5	404.282.532	5	DKP-PROV	
		3.25.04.1.05.06	PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN BUDIDAYA DI LAUT DAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH SAMPEL YANG DIAMBIL DALAM RANGKA PENGELOLAAN KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN	N/A	N/A	0	N/A	0	14	63.974.188	14	76.594.140	14	80.423.800	14	DKP-PROV	
		3.25.04.1.05.07	PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN PEMBUDDIDAYAAN IKAN DI LAUT DAN DI KAWASAN KONSERVASI YANG DIKELOLA OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	JUMLAH LOKASI PEMBUDDIDAYAAN KONSERVASI YANG DIBINA DAN DIPANTAU	N/A	N/A	0	N/A	0	2	92.086.680	2	104.391.840	2	109.611.400	2	DKP-PROV	
		3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	PRODUKSI BENIH/ BENUR UNGGUL KOMODITAS IKAN AIR PAYAU DAN LAUT	2662900	3500000	0	4920000	0	4537508	0	4764375	0	5002594	0	5002594	UPT-PBAPL	
		3.25.04.1.05	PENGELOLAAN PEMBUDDIDAYAAN IKAN DI LAUT	PERSENTASE SARANA DAN PRASARANA PEMBUDDIDAYAAN IKAN YANG BEROPERASIONAL DAN BERFUNGSI DENGAN BAIK DI UPT- PBAPL	N/A	N/A	0	N/A	0	80	0	90	0	100	0	100	UPT-PBAPL	
		3.25.04.1.05.02	PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDDIDAYAAN IKAN DI LAUT	JUMLAH PRASARANA PEMBUDDIDAYAAN LAUT YANG DIADAKAN	N/A	N/A	0	N/A	0	0	0	0	0	1	400.000.000	1	UPT-PBAPL	
		3.25.04.1.05.03	PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDDIDAYAAN IKAN DI LAUT DAN AIR TAWAR YANG PENGGUNAAN SUMBER DAYANYA LEBIH EFISIEN APABILA DILAKUKAN OLEH DAERAH PROVINSI DAN/ATAU DAMPAK NEGATIFNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENYEDIAAN PRASARANA PEMBUDDIDAYAAN IKAN DI LAUT DAN AIR TAWAR UPT-PBAPL	0	0	0	0	0	1	192.778.446	1	195.000.000	1	197.000.000	5	UPT-PBAPL	
		3.25.04.1.05.05	PENYEDIAAN SARANA PEMBUDDIDAYAAN IKAN DI LAUT DAN AIR TAWAR YANG PENGGUNAAN SUMBER DAYANYA LEBIH EFISIEN APABILA DILAKUKAN OLEH DAERAH PROVINSI DAN/ATAU DAMPAK NEGATIFNYA LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA	JUMLAH PENYEDIAAN SARANA PEMBUDDIDAYAAN IKAN DI LAUT DAN AIR TAWAR UPT-PBAPL	0	0	0	0	0	1	723.593.084	1	750.000.000	1	800.000.000	3	UPT-PBAPL	
		3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	PERSENTASE KEPATUHAN PELAKU USAHA KELAUTAN TERHADAP KETENTUAN PERATURAN DAN PER-UNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU	N/A	N/A	0	N/A	0	55	0	60	0	65	0	65	DKP-PROV	
		3.25.05.1.01	PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN SAMPAI DENGAN 12 MIL	PERSENTASE CAKUPAN WILAYAH LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL YANG DIPANTAU DARI ILEGAL FISHING	N/A	N/A	0	N/A	0	40	0	45	0	50	0	50	DKP-PROV	
		3.25.05.1.01.01	PENGAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL	JUMLAH PELAKU USAHA RUANG LAUT YANG DIPERIKSA	N/A	N/A	0	N/A	0	40	192.799.942	50	211.753.500	60	222.341.175	60	DKP-PROV	
		3.25.05.1.01.02	PENGAWASAN USAHA PERIKANAN TANGKAP SAMPAI DENGAN 12 MIL	JUMLAH PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP YANG DIPERIKSA	N/A	N/A	0	N/A	0	150	634.208.093	160	705.489.750	170	740.764.237	170	DKP-PROV	
		3.25.05.1.01.03	PENGAWASAN USAHA PERIKANAN BIDANG PEMBUDDIDAYAAN IKAN DI LAUT SAMPAI DENGAN 12 MIL	JUMLAH PELAKU USAHA PERIKANAN BUDIDAYA YANG DIPERIKSA	N/A	N/A	0	N/A	0	5	101.681.493	8	215.769.750	10	228.558.237	10	DKP-PROV	

		3.25.05.1.01.04	PENUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS)	JUMLAH KELOMPOK PENGAWAS YANG DI BINA	N/A	N/A	0	N/A	0	0	0	4	200.000.000	6	210.000.000	6	DKP-PROV	
		3.25.05.1.02	PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	FREKUENSI GELAR OPERASI PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN DI WILAYAH PERAIRAN UMUM LINTAS KAB/KOTA	N/A	N/A	0	N/A	0	8	0	10	0	12	0	12	DKP-PROV	
		3.25.05.1.02.01	PENGAWASAN USAHA PERIKANAN TANGKAP DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA	JUMLAH PELAKU USAHA PERIKANAN TANGKAP YANG DI PERIKSA	N/A	N/A	0	N/A	0	6	79.721.375	8	101.760.750	10	106.848.787	10	DKP-PROV	
		3.25.05.1.02.02	PENGAWASAN USAHA PERIKANAN BIDANG PEMBUDDIDAYAAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN LINTAS KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI SESUAI DENGAN KEWENANGANNYA	JUMLAH PELAKU USAHA PERIKANAN BIDANG PEMBUDDIDAYAAN IKAN YANG DIPERIKSA	N/A	N/A	0	N/A	0	0	0	2	100.000.000	4	110.000.000	4	DKP-PROV	
		3.25.05.1.02.03	PENGAWASAN USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	JUMLAH PELAKU USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL YANG DIPERIKSA	N/A	N/A	0	N/A	0	6	148.159.053	8	318.354.750	10	334.272.487	10	DKP-PROV	
		3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	PRODUKSI OLAHAN HASIL PERIKANAN (TON)	15414.64	N/A	0	15722.94	0	14937.39	0	16358.14	0	16685.3	0	16685.30	DKP-PROV	
		3.25.06.1.01	PENERBITAN IZIN USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	JUMLAH UPI YANG BERIZIN DAN TERCATAT SESUAI DENGAN PERATURAN DAN KETENTUAN YANG BERLAKU	N/A	N/A	0	N/A	0	20	0	21	0	22	0	22	DKP-PROV	
		3.25.06.1.01.01	PENETAPAN PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENERBITAN IZIN USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	JUMLAH PESERTA RAPAT TEKNIS PERSYARATAN DAN PROSEDUR PENERBITAN REKOMENDASI SIUP PENGOLAHAN DAN PEMASARAN	N/A	N/A	0	N/A	0	0	0	30	30.000.000	30	31.000.000	30	DKP-PROV	
		3.25.06.1.01.02	PENERBITAN REKOMENDASI IZIN USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	JUMLAH REKOMENDASI PERTIMBANGAN TEKNIS PERIZINAN PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN	N/A	N/A	0	N/A	0	4	72.518.975	5	110.728.800	6	116.265.240	6	DKP-PROV	
		3.25.06.1.01.03	PENYEDIAAN DATA DAN INFORMASI USAHA PEMASARAN DAN PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	JUMLAH DOKUMEN DATA DAN INFORMASI PRODUK PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	N/A	N/A	0	N/A	0	1	180.089.625	1	190.242.822	1	199.754.963	1	DKP-PROV	
		3.25.06.1.02	PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MENENGAH DAN BESAR	JUMLAH KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR YANG DI BINA	N/A	N/A	0	N/A	0	15	0	16	0	17	0	17	DKP-PROV	
		3.25.06.1.02.01	PELAKSANAAN BIMBINGAN DAN PENERAPAN PERSYARATAN ATAU STANDAR PADA USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MENENGAH DAN BESAR	JUMLAH UPI (UNIT PENGOLAHAN IKAN) DAN SENTRA PENGOLAHAN YANG DIBINA	N/A	N/A	0	N/A	0	11	79.913.588	12	115.029.600	13	120.781.080	13	DKP-PROV	
		3.25.06.1.02.02	PELAKSANAAN BIMBINGAN, FASILITASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI TERHADAP MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN DALAM RANGKA MENGHASILKAN PRODUK YANG AMAN UNTUK DIKONSUMSI/ATAU DIGUNAKAN, DAN	JUMLAH UNIT PENGOLAHAN IKAN (UPI) YANG DIREHABILITASI SARANA DAN PRASARANANYA	N/A	N/A	0	N/A	0	2	272.125.625	2	389.682.300	2	409.166.415	2	DKP-PROV	
		3.25.06.1.03	PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	JUMLAH KELOMPOK PENGOLAHAN DAN PEMASARAN (POKLAHSAR) YANG BERKEMBANG	N/A	N/A	0	N/A	0	40	0	42	0	44	0	44	DKP-PROV	
		3.25.06.1.03.01	PEMETAAN DAN PEMANTAUAN KEBUTUHAN BAHAN BAKU USAHA PENGOLAHAN/DISTRIBUSI IKAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	JUMLAH BAHAN BAKU PRODUK PERIKANAN	N/A	N/A	0	N/A	0	2,5	284.522.552	2,5	328.123.950	2,5	344.530.147	2,5	DKP-PROV	
		3.25.06.1.03.02	PEMBERIAN INSENTIF DAN FASILITASI BAGI PELAKU USAHA PERIKANAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	JUMLAH SARANA PEMASARAN DAN PERALATAN PENGOLAHAN YANG DI BERIKAN KE KELOMPOK PENGOLAH DAN PEMASAR PRODUK KP	N/A	N/A	0	N/A	0	100	411.136.877	150	800.000.000	200	1.000.000.000	200	DKP-PROV	
		3.25.06.1.03.03	PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN LOGISTIK IKAN LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM 1 (SATU) DAERAH PROVINSI	JUMLAH DATA BASE LOKASI PENGOLAH DAN PEMASAR PRODUK PERIKANAN DI KALBAR (UPI)	N/A	N/A	0	N/A	0	40	56.487.500	40	59.312.400	40	62.278.000	40	DKP-PROV	



	X.XX.01.1.01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD	N/A	N/A	0	N/A	0	1	6.000.000	1	6.000.000	1	7.000.000	1	UPT-PMHP
	X.XX.01.1.01.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN DPA-SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERUBAHAN DPA-SKPD	N/A	N/A	0	N/A	0	1	8.656.234	1	9.093.399	1	9.548.068	1	DKP-PROV
	X.XX.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA DAN KEUANGAN TEPAT WAKTU	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	
	X.XX.01.1.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN CAPAIAN KINERJA SKPD DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	N/A	N/A	0	N/A	0	1	22.104.000	1	34.400.000	1	34.400.000	1	UPT-PMHP
	X.XX.01.1.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN KINERJA	N/A	N/A	0	N/A	0	3	36.449.647	3	37.000.000	3	38.000.000	3	DKP-PROV
	X.XX.01.1.01.06	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	JUMLAH LAPORAN KINERJA	1	N/A	0	N/A	0	1	10.149.828	1	10.200.000	1	10.300.000	1	UPT-PBAPL
	X.XX.01.1.01	PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PENYUSUNAN PERENCANAAN KINERJA DAN KEUANGAN TEPAT WAKTU	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	
	X.XX.01.1.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	N/A	N/A	0	N/A	0	1	15.600.000	1	16.600.000	1	17.600.000	1	UPT-PMHP
	X.XX.01.1.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PENYUSUNAN LAPORAN MONEV LPD,LKPI DAN LAKIP	N/A	N/A	0	N/A	0	4	78.437.448	4	37.951.549	4	39.849.128	4	DKP-PROV
	X.XX.01.1.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH PENYUSUNAN LAPORAN LAKIP	N/A	N/A	0	N/A	0	1	1.764.510	1	1.782.155	1	1.799.978	1	UPT-PP
	X.XX.01.1.01.07	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	JUMLAH DOKUMEN LAKIP	1	N/A	0	N/A	0	1	7.875.980	1	8.500.000	1	9.000.000	1	UPT-PBAPL
	X.XX.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	
	X.XX.01.1.02.01	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	JUMLAH BULAN PEMBAYARAN GAJI DAN TUNJANGAN	14	14	0	14	0	14	16.828.181.086	14	17.668.983.706	14	18.943.057.954	14	DKP-PROV
	X.XX.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	
	X.XX.01.1.02.02	PENYEDIAAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS ASN				0		0		0		0		0		DKP-PROV
	X.XX.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	
	X.XX.01.1.02.03	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	JUMLAH DOKUMEN KEUANGAN YANG DIVERIFIKASI/ JUMLAH PENGAJUAN SPM	N/A	N/A	0	N/A	0	200	286.714.420	220	301.050.141	240	333.191.398	240	DKP-PROV
	X.XX.01.1.02.03	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	JUMLAH HONORARIUM PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD 1 TAHUN	N/A	N/A	0	N/A	0	1	147.730.000	1	162.503.000	1	178.753.300	1	UPT-PP
	X.XX.01.1.02.03	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	JUMLAH DOKUMEN KEUANGAN YANG DIVERIFIKASI/ JUMLAH PENGAJUAN SPM	N/A	N/A	0	N/A	0	1	140.700.000	1	140.700.000	1	140.700.000	1	UPT-PMHP
	X.XX.01.1.02.03	PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD	JUMLAH DOKUMEN KEUANGAN YANG DIVERIFIKASI/ JUMLAH PENGAJUAN SPM	1	N/A	0	N/A	0	1	117.540.000	1	117.540.000	1	117.540.000	1	UPT-PBAPL
	X.XX.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	
	X.XX.01.1.02.04	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD				0		0		0		0		0		DKP-PROV
	X.XX.01.1.02.04	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD	JUMLAH DOKUMEN PELAKSANAAN AKUNTANSI SKPD (DOKUMEN)	N/A	N/A	0	N/A	0	1	15.922.000	1	16.922.000	1	16.922.000	1	UPT-PMHP
	X.XX.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	
	X.XX.01.1.02.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD				0		0		0		0		0		DKP-PROV
	X.XX.01.1.02.05	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN YANG DISUSUN TEPAT WAKTU	N/A	N/A	0	N/A	0	1	9.285.000	1	13.000.000	1	16.000.000	1	UPT-PMHP
	X.XX.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN TINDAKLANJUT HASIL PEMERIKSAAN	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	
	X.XX.01.1.02.06	PENGLOLAAN DAN PENYIAPAN BAHAN TANGGAPAN PEMERIKSAAN	JUMLAH LAPORAN BAHAN TANGGAPAN	N/A	N/A	0	N/A	0	1	7.068.035	1	7.421.437	1	7.792.509	1	DKP-PROV
	X.XX.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN	2	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0	2	
	X.XX.01.1.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTER AN SKPD	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN YANG DISUSUN TEPAT WAKTU	N/A	N/A	0	N/A	0	1	63.041.383	1	66.193.452	1	69.503.125	1	DKP-PROV
	X.XX.01.1.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTER AN SKPD	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN BULANAN/SEMESTERAN	N/A	N/A	0	N/A	0	1	65.712.080	1	72.283.288	1	79.511.617	1	UPT-PP

		X.XX.01.1.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULAN/SEMESTERAN YANG DISUSUN TEPAT WAKTU	N/A	N/A		0	N/A		0	12	36.286.000	12	36.286.000	12	36.286.000	12	UPT-PMHP	
		X.XX.01.1.02.07	KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN YANG DISUSUN TEPAT WAKTU	1	N/A		0	N/A		0	1	18.173.859	1	18.500.000	1	18.600.000	1	UPT-PBAPL	
		X.XX.01.1.02	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	JUMLAH LAPORAN KEUANGAN	2	2		0	2		0	2	0	2	0	2	0	2		
		X.XX.01.1.02.08	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	JUMLAH PENYUSUNAN LAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	N/A	N/A		0	N/A		0	1	12.710.511	1	13.346.037	1	14.013.338	1	DKP-PROV	
		X.XX.01.1.02.08	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	JUMLAH DOKUMEN PENYUSUNAN LAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	N/A	N/A		0	N/A		0	2	16.799.000	2	19.799.000	2	19.799.000	2	UPT-PMHP	
		X.XX.01.1.02.08	PENYUSUNAN PELAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN	JUMLAH LAPORAN DAN ANALISIS PROGNOSIS REALISASI ANGGARAN (DOKUMEN)	1	N/A		0	N/A		0	1	19.172.564	1	19.300.000	1	19.400.000	1	UPT-PBAPL	
		X.XX.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100	100		0	100		0	100	0	100	0	100	0	100		
		X.XX.01.1.03.01	PENYUSUNAN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH	N/A	N/A		0	N/A		0	N/A	0	1	6.000.000	1	6.000.000	1	DKP-PROV	
		X.XX.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100	100		0	100		0	100	0	100	0	100	0	100		
		X.XX.01.1.03.02	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	JUMLAH BMD YANG DIAMANKAN	N/A	N/A		0	N/A		0	4	200.250.000	4	200.250.000	4	200.250.000	4	DKP-PROV	
		X.XX.01.1.03.02	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	JUMLAH ASURANSI BARANG MILIK DAERAH ( POLIS ASURANSI )	N/A	N/A		0	N/A		0	3	20.000.000	3	22.000.000	3	24.200.000	3	UPT-PP	
		X.XX.01.1.03.02	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	JUMLAH BMD YANG DIAMANKAN	3 UNIT	N/A		0	N/A		0	3 UNIT	11.000.000	3 UNIT	11.000.000	3 UNIT	11.000.000	3 UNIT	UPT-PBAPL	
		X.XX.01.1.03.02	PENGAMANAN BARANG MILIK DAERAH SKPD	JUMLAH BMD YANG DIAMANKAN	N/A	N/A		0	N/A		0	N/A	0	1	17.000.000	1	17.000.000	1	UPT-PMHP	
		X.XX.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100	100		0	100		0	100	0	100	0	100	0	100		
		X.XX.01.1.03.04	PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	JUMLAH LAPORAN PEMBINAAN , PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BMD	N/A	N/A		0	N/A		0	1	57.670.866	1	60.554.409	1	63.582.130	1	DKP-PROV	
		X.XX.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100	100		0	100		0	100	0	100	0	100	0	100		
		X.XX.01.1.03.05	REKONSILIASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	N/A	N/A		0	N/A		0	1	8.668.632	1	8.800.000	1	8.900.000	1	UPT-PMHP	
		X.XX.01.1.03	ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100	100		0	100		0	100	0	100	0	100	0	100		
		X.XX.01.1.03.06	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	JUMLAH LAPORAN BARANG	N/A	N/A		0	N/A		0	1	29.079.197	1	30.533.156	1	32.059.814	1	DKP-PROV	
		X.XX.01.1.03.06	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	JUMLAH LAPORAN BARANG	N/A	N/A		0	N/A		0	1	5.219.685	1	5.741.653	1	6.315.818	1	UPT-PP	
		X.XX.01.1.03.06	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	JUMLAH LAPORAN BARANG MILIK DAERAH	N/A	N/A		0	N/A		0	N/A	0	1	12.000.000	1	12.000.000	1	UPT-PMHP	
		X.XX.01.1.03.06	PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD	JUMLAH LAPORAN BARANG	1	N/A		0	N/A		0	1	8.668.632	1	8.800.000	1	8.900.000	1	UPT-PBAPL	
		X.XX.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE TINGKAT DISIPLIN APARATUR	100%	0		0	0		0	0	0	100%	0	100%	0	100%		
		X.XX.01.1.05.01	PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	JUMLAH SARANA PENINGKATAN PRASARANA DISIPLIN PEGAWAI	N/A	N/A		0	N/A		0	0	0	1	15.000.000	1	15.750.000	1	DKP-PROV	
		X.XX.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE TINGKAT DISIPLIN APARATUR	100%	0		0	0		0	0	0	100%	0	100%	0	100%		
		X.XX.01.1.05.02	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	JUMLAH PENGADAAN PAKAIAN DINAS	N/A	N/A		0	N/A		0	0	0	100	80.000.000	100	80.000.000	100	DKP-PROV	
		X.XX.01.1.05.02	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	JUMLAH PENGADAAN PAKAIAN DINAS	140	N/A		0	N/A		0	N/A	0	70	50.750.000	70	51.000.000	140	UPT-PBAPL	
		X.XX.01.1.05.02	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	JUMLAH STEL/POTONG PENGADAAN PAKAIAN DINAS (STEL)	N/A	N/A		0	N/A		0	N/A	0	25	24.000.000	25	48.000.000	25	UPT-PMHP	
		X.XX.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SESUAI PROSEDUR	100%	0		0	0		0	100%	0	100%	0	100%	0	100%		
		X.XX.01.1.05.03	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	JUMLAH LAPORAN PENILAIAN ANGKA KREDIT PEGAWAI DAN PENYUSUNAN ANJAB	N/A	N/A		0	N/A		0	1	18.185.763	1	19.095.051	1	20.049.804	1	DKP-PROV	
		X.XX.01.1.05.03	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	JUMLAH LAPORAN PENILAIAN ANGKA KREDIT PEGAWAI DAN PENYUSUNAN ANJAB	N/A	N/A		0	N/A		0	1	1.288.720	1	1.417.592	1	1.559.351	1	UPT-PP	
		X.XX.01.1.05.03	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	JUMLAH LAPORAN PENILAIAN ANGKA KREDIT PEGAWAI DAN PENYUSUNAN ANJAB	1 DOKUMEN	N/A		0	N/A		0	1	5.828.310	1	6.000.000	1	6.100.000	1	DOKUMEN	UPT-PBAPL

		X.XX.01.1.05.03	PENDATAAN DAN PENGOLAHAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN PENILAIAN ANGKA KREDIT PEGAWAI DAN PENYUSUNAN ANJAB	N/A	N/A		0	N/A	0	N/A	0	1	8.500.000	1	9.000.000	1	UPT-PMHP
		X.XX.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SESUAI PROSEDUR	100%	0		0	0	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	
		X.XX.01.1.05.04	KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	JUMLAH LAPORAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN	1	N/A		0	N/A	0	N/A	0	1	30.000.000	1	30.000.000	1	DKP-PROV
		X.XX.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE TINGKAT DISIPLIN APARATUR	100%	0		0	0	0	0	0	100%	0	100%	0	100%	
		X.XX.01.1.05.05	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN KINERJA INDIVIDU	N/A	N/A		0	N/A	0	1	9.007.480	1	8.532.909	1	8.959.554	1	DKP-PROV
		X.XX.01.1.05.05	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	JUMLAH DOKUMEN EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	N/A	N/A		0	N/A	0	N/A	0	1	12.000.000	1	12.000.000	1	UPT-PMHP
		X.XX.01.1.05.05	MONITORING, EVALUASI, DAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI	JUMLAH DOKUMEN LAPORAN KINERJA INDIVIDU	1 DOKUMEN	0		0	0	0	0	0	1	8.000.000	1	8.100.000	1 DOKUMEN	UPT-PBAPL
		X.XX.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI SESUAI DENGAN PERENCANAAN	100%	0		0	0	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	
		X.XX.01.1.05.09	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	JUMLAH PEGAWAI YANG MENGIKUTI DIKLAT MINIMAL 20 JP	N/A	N/A		0	N/A	0	10	40.000.000	10	27.720.000	10	29.106.000	10	DKP-PROV
		X.XX.01.1.05.09	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	JUMLAH ASN YANG MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN LATIHAN	N/A	N/A		0	N/A	0	10	5.000.000	10	5.500.000	10	6.050.000	10	UPT-PP
		X.XX.01.1.05.09	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PEGAWAI BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	JUMLAH ASN YANG MENGIKUTI DIKLAT/ KURSUS SINGKAT	N/A	N/A		0	N/A	0	25	6.000.000	25	30.000.000	25	40.000.000	25	UPT-PMHP
		X.XX.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI SESUAI DENGAN PERENCANAAN	100%	0		0	0	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	
		X.XX.01.1.05.10	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH PEGAWAI YANG MENGIKUTI DIKLAT MENGIKUTI SOSIALISASI	N/A	N/A		0	N/A	0	5	24.500.000	5	26.250.000	5	27.562.500	5	DKP-PROV
		X.XX.01.1.05.10	SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH ASN YANG MENGIKUTI SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	N/A	N/A		0	N/A	0	25	3.250.000	5	10.000.000	25	15.000.000	25	UPT-PMHP
		X.XX.01.1.05	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI SESUAI DENGAN PERENCANAAN	100%	0		0	0	0	100%	0	100%	0	100%	0	100%	
		X.XX.01.1.05.11	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH PESERTA BIMTEK	N/A	N/A		0	N/A	0	10	10.000.000	10	52.416.000	10	55.036.800	10	DKP-PROV
		X.XX.01.1.05.11	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH ASN YANG MENGIKUTI SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS.	N/A	N/A		0	N/A	0	10	20.000.000	10	22.000.000	10	24.200.000	10	UPT-PP
		X.XX.01.1.05.11	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH ASN YANG MENGIKUTI BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	N/A	N/A		0	N/A	0	25	2.990.000	25	10.000.000	25	20.000.000	25	UPT-PMHP
		X.XX.01.1.05.11	BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH ASN YANG MENGIKUTI BIMTEK	10 ORANG	N/A		0	N/A	0	10	17.000.000	10	18.000.000	10	19.000.000	10 ORANG	UPT-PBAPL
		X.XX.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN BARANG	100	100		0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	
		X.XX.01.1.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	JUMLAH KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	N/A	N/A		0	N/A	0	7	10.498.750	7	11.023.688	7	11.574.872	7	DKP-PROV
		X.XX.01.1.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	JUMLAH KOMPONEN ALAT LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	N/A	N/A		0	N/A	0	10	47.987.800	10	52.786.580	10	58.065.238	10	UPT-PP
		X.XX.01.1.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	JUMLAH KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	N/A	N/A		0	N/A	0	1	14.442.280	1	14.442.280	1	14.442.280	1	UPT-PMHP
		X.XX.01.1.06.01	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	JUMLAH KOMPONEN INSTALASI LISTRIK / PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	8	N/A		0	N/A	0	8	34.998.593	8	35.100.000	8	35.200.000	8	UPT-PBAPL
		X.XX.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN BARANG	100	100		0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	
		X.XX.01.1.06.02	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH JENIS PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	N/A	N/A		0	N/A	0	7	57.631.530	7	60.513.107	7	63.538.762	7	DKP-PROV
		X.XX.01.1.06.02	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	N/A	N/A		0	N/A	0	27	65.639.970	27	72.203.967	27	79.424.363	27	UPT-PP
		X.XX.01.1.06.02	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	N/A	N/A		0	N/A	0	24	73.188.443	24	75.000.000	24	80.000.000	24	UPT-PMHP
		X.XX.01.1.06.02	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	JUMLAH JENIS PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	39 JENIS	N/A		0	N/A	0	39	35.138.828	39	35.200.000	39	35.300.000	39 JENIS	UPT-PBAPL
		X.XX.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN BARANG	100	100		0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	
		X.XX.01.1.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	JUMLAH JENIS PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	N/A	N/A		0	N/A	0	6	79.317.000	6	82.096.350	6	86.201.168	6	DKP-PROV

		X.XX.01.1.06.03	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	JUMLAH PERSEDIAAN PERLENGKAPAN PERALATAN RUMAH TANGGA	N/A	N/A	0	N/A	0	15	24.559.740	15	26.000.000	15	30.000.000	15	UPT-PMHP					
		X.XX.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN BARANG	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100				
		X.XX.01.1.06.04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	JUMLAH PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	N/A	N/A	0	N/A	0	0	0	1	5.000.000	2	5.250.000	2	DKP-PROV					
		X.XX.01.1.06.04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	JUMLAH BAHAN LOGISTIK KANTOR	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	28.000.000	1	30.800.000	2	33.880.000	2	UPT-PP					
		X.XX.01.1.06.04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	JUMLAH BAHAN LOGISTIK KANTOR (PENGADAAN MEDIA REAGENSIA)	N/A	N/A	0	N/A	0	3	372.632.708	3	472.632.708	3	572.632.708	3	UPT-PMHP					
		X.XX.01.1.06.04	PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	JUMLAH PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR	1	N/A	0	N/A	0	1	21.000.000	1	21.500.000	1	22.000.000	1	UPT-PBAPL					
		X.XX.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN BARANG	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100				
		X.XX.01.1.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH PENYEDIAAN BARANG CETAKAN	N/A	N/A	0	N/A	0	12	5.090.000	12	53.679.150	12	56.363.108	12	DKP-PROV					
				JUMLAH PENYEDIAAN BAHAN PENGGANDAAN	N/A	N/A	0	N/A	0	41709	5.090.000	42000	12.600.000	42500	12.750.000	41500	DKP-PROV					
		X.XX.01.1.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	N/A	N/A	0	N/A	0	1	6.107.525	1	6.718.277	1	7.390.104	1	UPT-PP					
		X.XX.01.1.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	N/A	N/A	0	N/A	13.675.000	1	24.552.365	1	26.500.000	1	28.500.000	1	UPT-PMHP					
		X.XX.01.1.06.05	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	JUMLAH PENYEDIAAN BARANG CETAKAN	9	JENIS	N/A	0	N/A	0	9	JENIS	14.422.585	9	JENIS	14.600.000	9	JENIS	14.700.000	9	JENIS	UPT-PBAPL
				JUMLAH PENYEDIAAN BAHAN PENGGANDAAN	10.000	LEMBAR	0	0	0	10.000	LEMBAR	3.000.000	10.000	LEMBAR	3.000.000	10.000	LEMBAR	3.000.000	10.000	LEMBAR	UPT-PBAPL	
		X.XX.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN BARANG	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100				
		X.XX.01.1.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH JENIS BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	N/A	N/A	0	N/A	0	2	10.180.000	2	10.698.000	2	11.223.450	2	DKP-PROV					
		X.XX.01.1.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH BAHAN BACAAN	N	N	0	N	0	1	TAHU N	2.000.000	1	TAHU N	2.200.000	1	TAHU N	2.400.000	1	TAHU N	UPT-PP	
		X.XX.01.1.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH BAHAN BACAAN	2	2	2.880.000	2	2.880.000	2	2.880.000	2	2.880.000	2	2.880.000	2	2.880.000	2	2.880.000	2	2.880.000	UPT-PMHP
		X.XX.01.1.06.06	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	JUMLAH JENIS BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	2	N/A	0	N/A	0	2	2.784.000	2	2.800.000	2	2.850.000	2	2.850.000	2	2.850.000	2	2.850.000	UPT-PBAPL
		X.XX.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN BARANG	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100				
		X.XX.01.1.06.07	PENYEDIAAN BAHAN/MATERIAL	JUMLAH BAHAN MATERIAL YANG DISEDIAKAN	N/A	N/A	0	N/A	0	0	0	1	5.000.000	1	5.250.000	1	DKP-PROV					
		X.XX.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN BARANG	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100				
		X.XX.01.1.06.08	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	% KUNJUNGAN TAMU YANG DIFASILITASI	N/A	N/A	0	N/A	0	100	79.980.000	100	83.979.000	100	88.177.950	100	DKP-PROV					
		X.XX.01.1.06	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN BARANG	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100				
		X.XX.01.1.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	JUMLAH RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	N/A	N/A	0	N/A	0	20	390.569.000	21	410.097.450	22	430.602.323	22	DKP-PROV					
		X.XX.01.1.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	JUMLAH RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	N/A	N/A	0	N/A	0	21	85.862.000	22	94.448.200	22	103.893.020	22	UPT-PP					
		X.XX.01.1.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	JUMLAH RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD YANG DILAKSANAKAN	N/A	N/A	0	N/A	0	25	30.000.000	25	30.000.000	25	30.000.000	25	UPT-PMHP					
		X.XX.01.1.06.09	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	JUMLAH RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI PD	1	N/A	0	N/A	0	1	52.402.000	1	53.000.000	1	54.000.000	1	UPT-PBAPL					
				PERSENTASE TERTIB PENGELOLAAN ARSIP	N/A	N/A	0	N/A	0	50	0	60	0	70	0	70	0	70				
		X.XX.01.1.06.10	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	JUMLAH ARSIP YANG DIOLAH	N/A	N/A	0	N/A	0	200	38.674.126	210	40.607.832	220	42.638.224	220	DKP-PROV					
				PERSENTASE SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK YANG DIKELOLA DENGAN BAIK	N/A	N/A	0	N/A	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100				
		X.XX.01.1.06.11	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	JUMLAH DOKUMEN DATA DAN INFORMASI SKPD LEWAT MEDIA ELEKTRONIK	N/A	N/A	0	N/A	0	1	102.836.995	1	103.757.845	1	108.945.737	1	DKP-PROV					
		X.XX.01.1.06.11	DUKUNGAN PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	JUMLAH PELAKSANAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PADA SKPD	N/A	N/A	0	N/A	0	1	7.000.000	1	7.000.000	1	7.000.000	1	UPT-PMHP					
		X.XX.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH DAN PRASARANA PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA TUGAS	70	90	0	85	0	90	0	95	0	100	0	100	0	100				
		X.XX.01.1.07.05	PENGADAAN MEBEL	JUMLAH PENGADAAN MEBELAIR	N/A	N/A	0	N/A	0	12	19.056.250	12	18.770.063	12	19.708.566	12	DKP-PROV					

		X.XX.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA TUGAS	70	80		0	85		0	90		0	95		0	100		0	100		
		X.XX.01.1.07.06	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	N/A	N/A		0	N/A		0	12	111.091.300	12	98.965.283	12	103.913.547	12			12		DKP-PROV
		X.XX.01.1.07.06	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	N/A	N/A		0	N/A		0	24	847.816.250	24	932.597.875	24	1.025.858.957	24			24		UPT-PP
		X.XX.01.1.07.06	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN TAHUN BERJALAN	N/A	N/A		0	N/A	122.450.000		N/A	53.095.300	1	85.000.000	1	90.000.000	1			1		UPT-PMHP
		X.XX.01.1.07.06	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	24	N/A		0	N/A		0	8	121.477.648	8	122.000.000	8	123.000.000	24			24		UPT-PBAPL
		X.XX.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA TUGAS	70	80		0	85		0	90		0	95		0	100		0	100		
		X.XX.01.1.07.07	PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA	JUMLAH PENGADAAN ASET TETAP LAINNYA TAHUN BERJALAN	N/A	N/A		0	N/A		0	11	115.610.000	11	115.610.000	11	115.610.000	11			11		UPT-PMHP
		X.XX.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA TUGAS	70	80		0	85		0	90		0	95		0	100		0	100		
		X.XX.01.1.07.09	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH PENGADAAN GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	N/A	N/A		0	N/A		0	N/A	0	N/A	0	1	10.000.000	0			1		DKP-PROV
		X.XX.01.1.07.09	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH PENGADAAN GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	3	N/A		0	N/A		0	1	204.253.027	1	205.000.000	1	206.000.000	3			3		UPT-PBAPL
		X.XX.01.1.07.09	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH PENGADAAN GEDUNG KANTOR / PEMBANGUNAN KEMBALI GEDUNG KANTOR (UNIT)	N/A	N/A		0	N/A		0	N/A	0	1	2.000.000.000	0	0	0			0		UPT-PMHP
		X.XX.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA TUGAS	70	80		0	85		0	90		0	95		0	100		0	100		
		X.XX.01.1.07.10	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR YANG DIBANGUN	N/A	N/A		0	N/A		0	1	216.860.000	1	232.050.000	1	243.652.500	1			1		DKP-PROV
		X.XX.01.1.07.10	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR YANG DIBANGUN	N/A	N/A		0	N/A		0	N/A	0	1	170.000.000	1	800.000.000	1			1		UPT-PMHP
		X.XX.01.1.07.10	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	27	N/A		0	N/A		0	9	92.113.613	9	93.000.000	9	93.000.000	27			27		UPT-PBAPL
		X.XX.01.1.07	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	PERSENTASE PEMENUHAN KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA TUGAS	70	80		0	85		0	90		0	95		0	100		0	100		
		X.XX.01.1.07.11	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KANTOR YANG DISEDIAKAN	N/A	N/A		0	N/A		0	N/A	0	N/A	0	1	200.000.000	1			1		DKP-PROV
		X.XX.01.1.07.11	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG KANTOR YANG DISEDIAKAN	N/A	N/A		0	N/A		0	N/A	0	2	75.000.000	2	85.000.000	2			2		UPT-PMHP
		X.XX.01.1.07.11	PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	3	N/A		0	N/A		0	1	164.722.637	1	165.000.000	1	166.000.000	3			3		UPT-PBAPL
		X.XX.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	100		0	100		0	100		0	100		0	100		0	100		
		X.XX.01.1.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	JUMLAH LAYANAN PENGIRIMAN SURAT	N	N		0	N		0	1	990.000	1	1.089.000	1	1.197.900	1			1		UPT-PP
		X.XX.01.1.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	JUMLAH SURAT YANG DIKIRM	N/A	N/A		0	N/A		0	N/A	0	500	10.000.000	500	10.000.000	500			500		UPT-PMHP
		X.XX.01.1.08.01	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	JUMLAH PENGIRIMAN SURAT MELALUI MEDIA JASA / MELALUI PETUGAS ANTARA SKPD	N/A	N/A		0	N/A		0	N/A	0	1	7.000.000	1	8.000.000	1			1		DKP-PROV
		X.XX.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	100		0	100		0	100		0	100		0	100		0	100		
		X.XX.01.1.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	FREKUENSI PEMBAYARAN LISTRIK KANTOR, DAN INTERNET.	N	N		0	N		0	1	542.940.070	1	597.234.277	1	656.957.704	1			1		DKP-PROV
		X.XX.01.1.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	JUMLAH BULAN PELAYANAN	N/A	N/A		0	N/A		0	12	353.057.280	12	428.551.200	12	449.978.760	12			12		UPT-PP
		X.XX.01.1.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	JUMLAH PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK KANTOR	3	3	140.000.000	3	140.000.000		3	114.900.000	3	114.900.000	3	114.900.000	3			3		UPT-PMHP	
		X.XX.01.1.08.02	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	JUMLAH BULAN PELAYANAN	12	N/A		0	N/A		0	12	185.310.900	12	187.000.000	12	188.000.000	12			12		UPT-PBAPL
		X.XX.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	100		0	100		0	100		0	100		0	100		0	100		
		X.XX.01.1.08.03	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR					0			0		0		0		0			0			DKP-PROV
		X.XX.01.1.08	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	100		0	100		0	100		0	100		0	100		0	100		
		X.XX.01.1.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	JUMLAH JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	N/A	N/A		0	N/A		0	2	853.118.938	2	938.430.832	2	1.032.274.269	2			2		DKP-PROV

		X.XX.01.1.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	% PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	N/A	N/A	0	N/A	0	100	558.295.760	100	578.536.098	100	607.462.903	100	UPT-PP	
		X.XX.01.1.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	JUMLAH LAYANAN JASA KEBERSIHAN KANTOR (KEGIATAN) JUMLAH JASA TENAGA KONTRAK SKPD (SATUAN PENGAMANAN DAN TENAGA ANALIS)	2	2	0	2	0	2	328.673.800	2	328.673.800	2	328.673.800	2	UPT-PMHP	
		X.XX.01.1.08.04	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	PERSENTASE PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	100%	0	0	0	0	100%	383.451.612	100%	383.500.000	100%	384.000.000	100%	UPT-PBAPL	
		X.XX.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE BMD DALAM KONDISI BAIK	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100		
		X.XX.01.1.09.01	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN				0		0		0		0		0		DKP-PROV	
		X.XX.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE BMD DALAM KONDISI BAIK	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100		
		X.XX.01.1.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	JUMLAH KENDARAAN YANG DI PELIHARA	N/A	N/A	0	N/A	0	5	107.554.800	5	75.531.540	5	79.308.117	5	DKP-PROV	
		X.XX.01.1.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	JUMLAH KENDARAAN YANG DIPELIHARA	N/A	N/A	0	N/A	0	5	73.709.920	5	81.080.912	5	89.189.003	5	UPT-PP	
		X.XX.01.1.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	JUMLAH KENDARAAN YANG DI PELIHARA (UNIT)	N/A	N/A	0	N/A	0	1	34.058.260	1	25.000.000	1	25.000.000	1	UPT-PMHP	
		X.XX.01.1.09.02	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN	JUMLAH KENDARAAN YANG DIPELIHARA	7	N/A	0	N/A	0	7	39.821.425	7	40.000.000	7	40.500.000	7	UPT-PBAPL	
		X.XX.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE BMD DALAM KONDISI BAIK	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100		
		X.XX.01.1.09.05	PEMELIHARAAN MEBEL	JUMLAH MEBELUR YANG DIPELIHARA	N/A	N/A	0	N/A	0	2	10.000.000	2	12.600.000	2	13.230.000	2	DKP-PROV	
		X.XX.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE BMD DALAM KONDISI BAIK	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100		
		X.XX.01.1.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH PERALATAN MESIN YANG DIPELIHARA	N/A	N/A	0	N/A	0	5	92.748.375	5	85.835.794	5	9.012.758.344	5	DKP-PROV	
		X.XX.01.1.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN YANG DIPELIHARA	N/A	N/A	0	N/A	0	5	109.381.950	5	120.320.145	5	132.352.160	5	UPT-PP	
		X.XX.01.1.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH JASA SERVICE DAN PERBAIKAN ALAT MESIN KANTOR	N/A	N/A	0	N/A	0	1	69.567.150	1	69.567.150	1	69.567.150	1	UPT-PMHP	
		X.XX.01.1.09.06	PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	JUMLAH PERALATAN DAN MESIN YANG DIPELIHARA	6	N/A	0	N/A	0	6	61.399.400	6	62.000.000	6	62.500.000	6	UPT-PBAPL	
		X.XX.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE BMD DALAM KONDISI BAIK	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100		
		X.XX.01.1.09.07	PEMELIHARAAN ASET TETAP LAINNYA	JUMLAH PEMELIHARAAN ASET TETAP KANTOR	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	75.567.000	1	75.567.000	1	UPT-PMHP	
		X.XX.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE BMD DALAM KONDISI BAIK	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100		
		X.XX.01.1.09.09	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH GEDUNG YANG DIPELIHARA DAN DIREHABILITASI	N/A	N/A	0	N/A	0	1	211.180.000	1	210.262.500	1	220.775.625	1	DKP-PROV	
		X.XX.01.1.09.09	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	N/A	N/A	0	N/A	0	1	0	1	175.000.000	1	175.000.000	1	UPT-PMHP	
		X.XX.01.1.09.09	PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH GEDUNG YANG DIPELIHARA DAN DIREHABILITASI	1	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	UPT-PBAPL	
		X.XX.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE BMD DALAM KONDISI BAIK	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100		
		X.XX.01.1.09.10	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA DAN DIREHABILITASI	N/A	N/A	0	N/A	0	1	77.358.560	1	78.748.488	1	82.685.912	1	DKP-PROV	
		X.XX.01.1.09.10	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA	N/A	N/A	0	N/A	0	1	67.900.000	1	74.690.000	1	82.159.000	1	UPT-PP	

		X.XX.01.1.09.10	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	175.000.000	1	175.000.000	1	UPT-PMHP	
		X.XX.01.1.09.10	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA DAN DIREHABILITASI	1	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	UPT-PBAPL	
		X.XX.01.1.09	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	PERSENTASE BMD DALAM KONDISI BAIK	100	100	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100		
		X.XX.01.1.09.11	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA				0		0		0		0		0		DKP-PROV	
		X.XX.01.1.09.11	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA YANG DIPELIHARA / DIREHABILITASI	N/A	N/A	0	N/A	0	1	324.655.500	1	357.121.050	1	392.833.155	1	UPT-PP	
		X.XX.01.1.09.11	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH JASA PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN	N/A	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	185.000.000	1	185.000.000	1	UPT-PMHP	
		X.XX.01.1.09.11	PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	JUMLAH SARANAN DAN PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR / BANGUNAN YANG DIPELIHARA	1	N/A	0	N/A	0	N/A	0	1	200.000.000	1	200.000.000	1	UPT-PBAPL	

**BAB. VII**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan kelautan dan perikanan pada BAB 7 ini, adalah indikator untuk melihat kondisi kinerja dari pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Barat pada 5 (lima) tahun kedepan. Adapun Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dan program Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mangacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3		4	5		6	7
1	Laju Pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan (%)	3.65	3.37	1,27 - 3,09	3,73 - 4,29	3,92 - 4,52	4,09 - 4,64	4,09 - 4,64
2	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	165,255.0	165,614.3	168.926,61	150,380.0	154,891.4	159,538.1	159,538
3	Produksi Perikanan yang didaratkan di pelabuhan (Ton)	4,704.92	4,750.00	4,800.00	4,850.00	4,900.00	5,000.00	5,000
4	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	83,227.39	84,000.00	85,680.00	77,244.60	78,789.49	80,365.28	80,365
5	Produksi Benih/ Benur Unggul Komoditas Ikan Air Payau dan Laut (ekor)	2,662,900	0.00	4,920,000	4,537,500	4,764,375	5,002,594	5,002,594

No	INDIKATOR	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3		4	5		6	7
6	NTP Perikanan (angka)	100.0	101.0	102.0	103.0	104.0	105.0	105
8	Produksi olahan hasil perikanan (ton)	n/a	n/a	n/a	16,037.40	16,358.15	16,685.31	16,685
9	Jumlah Layanan Uji Mutu Hasil Perikanan yang diberikan kepada unit pengolahan ikan dan Masyarakat (Kali)	315	325	335	600	625	650	650
10	Persentase pengelolaan kawasan Ruang Laut dan Konservasi (persen)	n/a	n/a	n/a	30	40	50	50
11	Persentase desa Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang di berdayakan (persen)	n/a	n/a	n/a	20	30	40	40
12	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan Perikanan terhadap ketentuan peraturan dan per Undang-Undangan yang berlaku (persen)	n/a	n/a	n/a	55	60	65	65

## **BAB . VIII**

### **PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat disusun berdasarkan program strategis dan kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan sesuai dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat perubahan Tahun 2018-2023. Pelaksanaan Rencana Strategis rencana jangka menengah dimana digunakan sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan dalam pembangunan Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan pada tugas penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan. Dalam kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2023. Dengan melaksanakan penyusunan Renstra ini sangat diperlukan adanya partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat karena akan menentukan suatu keberhasilan program dan kegiatan yang telah direncanakan sebagaimana yang telah tertuang dalam rencana strategis periode 2018-2023.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat ini menjadi pedoman bagi bidang-bidang di Dinas Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan selama kurun waktu tahun 2018 - 2023. Dalam pelaksanaannya, Renstra ini akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah . Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dirumuskan kaidah - kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Seluruh bidang di Dinas Kelautan dan Perikanan wajib mempedomani Renstra PD dalam penyusunan Renja PD.
- 2) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renstra SKPD, Kepala PD melakukan pemantauan terhadap penjabaran Renstra PD ke dalam Renja PD untuk menjamin konsistensi dan sinergitas pembangunan dalam upaya pencapaian visi dan misi Dinas Kelautan dan Perikanan.
- 3) Renstra PD ini memiliki jangka waktu 5 tahun, maka dapat dilakukan evaluasi paruh waktu Renstra PD untuk mengetahui sejauh mana tingkat pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Sehingga Rencana Strategis ini disusun bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansi merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang memang dibutuhkan oleh stakeholders terkait dan merupakan suatu tujuan yang hendak dicapai.

Akhir kata semoga penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023, dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan kaidah dan tahapan - tahapan yang ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Kalimantan Barat yang merata dan beradil.

Pontianak, Februari 2021

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Kalimantan Barat



**Ir. HERTI HERAWATI, MMA**

Pembina Utama Madya

NIP.19680725 199303 2 003

Lampiran 1

**Definisi dan Rumus Indikator Kinerja Utama**

Definisi dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan sesuai Tujuan RPJMD dan Sasaran PD adalah sebagai berikut :

**1. Jumlah Produksi Perikanan (Ton)**

Definisi	Produksi ikan mencakup semua hasil penangkapan/budidaya ikan/bitang air lainnya/tanaman air yang ditangkap/dipanendari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan.
Satuan	Ton
Rumus	$\Sigma = \text{Total Produksi Perikanan tangkap} + \text{Total Produksi Perikanan budidaya}$
Data	Data Statistik Dinas Kelautan dan Perikanan

**2. Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan (%)**

Definisi	Merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh sub sektor perikanan dalam suatu daerah tertentu untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.
Satuan	Persen (%)
Rumus	$G = \frac{\text{PDRB 1} - \text{PDRB 0}}{\text{PDRB 0}} \times 100\%$
Data	BPS

**3. Nilai Tukar Perikanan (NTP) (%)**

Definisi	Merupakan indicator proxy kesejahteraan nelayan maupun pembudidaya ikan selain itu juga merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima nelayan maupun pembudidaya ikan dengan indeks harga yang dibayar nelayan maupun pembudidaya ikan
Satuan	Persen (%)
Rumus	Dilakukan dengan cara wawancara langsung
Data	BPS



